



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR

Jl. Raya Malino KM. 18 Borongloe, Kab. Gowa (Telp.) 0411-8210001, (Fax) 0411-861712, email : upt_makassar@postel.go.id

LAKIN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021





Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat diselesaikan dan dipaparkan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran di tahun 2021 kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

LAKIN ini merupakan media pelaporan kinerja instansi yang diukur dari pencapaian target kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan dengan melihat hasil pelaksanaannya selama tahun 2020 yang berkaitan dengan aspek keuangan, kepegawaian, peningkatan SDM, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan perangkat monitoring sistem, penegakan hukum dan pelayanan publik serta ketatausahaan yang implementasinya dirinci pada Program Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengukur kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2020 dengan mengkomparasikan antara tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI dengan target kinerja hasil pelaksanaan selama tahun 2021, dan juga sebagai bahan evaluasi kinerja untuk tahun anggaran berikutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya pada tahun 2020. Kami menyadari bahwa hasil yang diinformasikan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun guna mewujudkan laporan yang lebih baik di tahun yang akan datang.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang terlibat maupun yang mendukung penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2020 ini, semoga Allah SWT menilainya sebagai amal ibadah, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh.

Kab. Gowa, Januari 2022
Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

Helmi Wartapane



Kata Pengantar

Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

“

...implementasinya dirinci pada Program Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengukur kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2021 dengan mengkomparasikan antara tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar...





A. Pencapaian PK UPT

Secara spesifik tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) meliputi urusan tata usaha dan kerumahtanggaan termasuk penyusunan rencana dan program, kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, pengukuran stasiun radio, pemantauan atau monitoring dan penertiban frekuensi radio, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, verifikasi dan validasi data pengguna frekuensi radio, evaluasi dan pengujian ilmiah, pelayanan pengaduan masyarakat, serta penanganan gangguan penggunaan spectrum frekuensi radio.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 adalah realisasi program kerja yang berhasil dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 yang tercermin dalam laporan akuntabilitas keuangan dan laporan capaian kinerja tahun anggaran 2021.

Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar 99,24% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.254.226.000,-. Hal ini menunjukkan indikator keseluruhan program kerja berhasil terlaksana dengan baik.

Penilaian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat dilihat dari capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian 2021	Persentase
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan public spectrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	1. Persentase(%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	50%	82,82%	165,65%
		2. Persentase (%) okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	80%	91,67%	114,58%
		3. Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	70%	75,84%	108,35%
		4. Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	90%	100%	111,11%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85%	91,89%	108,10%
		6. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%	100%	103,09%
		7. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70%	77,14%	110,20%
		8. Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166,67%



		9.	Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%
		10.	Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	80%	100%	125%
		11.	Persentase (%) Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT	100%	100%	100%
		12.	Persentase (%) Pelaksanaan dan Penanganan Piutang BHP	100%	100%	100%
		13.	Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan	90%	141,05%	156,72%
		14.	Persentase (%) Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR	90%	92,78%	103,08%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI		86	96,38	112,06%

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Berikut penjelasan singkat mengenai pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar untuk tahun anggaran 2021.

Pada Sasaran Kinerja 1 **“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertibanserta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”** terdapat 14 indikator kinerja. Berikut penjelasan pencapaian masing-masing indikator kinerja.

Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 35% pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan 21 kegiatan pengukuran stasiun radio dan televisi siaran selama tahun anggaran 2021 dari 19 kegiatan yang ditargetkan. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 82,82% melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 35% dengan persentase capaian sebesar 165,65%.

Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 80% okupansi penggunaan frekuensi radio di Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Makassar telah melaksanakan 28 kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika selama tahun anggaran 2021 dari 26 kegiatan yang ditargetkan. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 91,67% dari target sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 114,58%. Capaian ini telah melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Persentase (%) Jumlah ISR yang Termonitor

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 70% jumlah ISR yang termonitor untuk tahun anggaran 2021, yaitu sebanyak 435 ISR dari 621 ISR pada wilayah kerja Sulawesi Selatan. Capaian Balai Monitor SFR Kelas I Makassar pada akhir tahun anggaran 2021 sebanyak 471 ISR atau sebesar 75,84% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70% dengan persentase capaian sebesar 108,35%.

Persentase (%) Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 90% hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi untuk tahun anggaran 2021. Pada akhir tahun anggaran 2021 realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dari target sebesar 90%, dengan persentase capaian sebesar 111,11 %.

Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 85% berfungsi perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT untuk tahun anggaran 2021. Pada akhir tahun anggaran 2021 realisasi untuk indikator ini sebesar 91,89% dari target sebesar 85%, dengan persentase capaian sebesar 108,10%.

Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 97% penanganan gangguan spectrum frekuensi radio untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan 16 kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio selama tahun 2021 dari 13 kegiatan yang ditargetkan. Pada akhir tahun anggaran 2021 realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dari target sebesar 97%, dengan persentase capaian sebesar 103,09%.

Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 70% penertiban spectrum frekuensi radio untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan 13 kegiatan penertiban spectrum frekuensi radio dan tindak lanjut hasil penertiban selama tahun 2021. Pada akhir tahun anggaran 2021 realisasi untuk indikator ini sebesar 77,14% dari target sebesar 70%, dengan persentase capaian sebesar 110,20%.

Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 1 kegiatan monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan 3 kegiatan monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi selama tahun 2021. Capaian untuk indikator ini sebesar 300%.

Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 1 kegiatan penertiban sertifikat/alat perangkat telekomunikasi untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan 3 kegiatan penertiban sertifikat/alat perangkat telekomunikasi selama tahun anggaran 2021 dari target 1 kegiatan, sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 300%.

Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 80% pelaksanaan sosialisasi pelayanan public untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah melaksanakan dua kegiatan Sosialisasi yang dihadiri oleh pelaku usaha dan pemerintahan dari bidang dinas penyiaran, dinas bergerak darat dari 24 kabupaten/kota di wilayah kerja Sulawesi Selatan. Capaian untuk indikator ini sebesar 125% untuk tahun anggaran 2021.

Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 100% pelaksanaan ujian negara amatir radio berbasis CAT untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio Non Reguler dan Reguler selama tahun 2021. Pada akhir tahun anggaran 2021 realisasi untuk indicator ini sebesar 100% dari target 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 100% pelaksanaan pencegahan dan penanganan piutang BHP frekuensi radio untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan kegiatan pendistribusian SPP dan klarifikasi piutang BHP frekuensi radio selama tahun 2021. Pada akhir tahun anggaran 2021 realisasi untuk indicator ini sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 90% persentase pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR maritime untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan kegiatan sosialisasi di bidang maritim pada tahun anggaran 2021 dengan jumlah peserta melebihi 30 orang, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar juga memperoleh 32 ISR maritime efektif dari target 10 ISR maritime efektif. Capaian untuk indicator ini sebesar 141,05%.

Persentase Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR

Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan 90% pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan 23 kegiatan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR selama tahun 2021 dari target 19 kegiatan. Pada akhir tahun anggaran 2021 realisasi untuk indikator ini sebesar 92,78% dari target sebesar 90%, dengan persentase capaian sebesar 103,08%.

Pada Sasaran Kinerja 2 **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien”** terdapat 1 indikator kinerja. Berikut penjelasan pencapaian indikator kinerja tersebut.

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI

Penyempurnaan kualitas pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dengan diimplementasikannya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mulai dilakukan pada tahun 2019. Pada tahun 2021, Ditjen SDPPI menargetkan nilai IKPA sebesar 96% untuk tahun anggaran 2021. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mencapai IKPA Score sebesar 96,38% pada akhir tahun anggaran 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar berhasil mencapai IKPA Score melebihi target yang ditentukannya itu 86%. Pembobotan IKPA berdasarkan Kementerian Keuangan meliputi realisasi anggaran, tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, renkas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus dan dispensasi SPM.

B. Pencapaian Penertiban Nasional Untuk Pengguna Frekuensi Radio

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumberdaya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara, sehingga pemanfaatan spectrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dalam pemanfaatannya perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan dan kerugian dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan penyelenggaraan telekomunikasi, serta penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal maka operasi penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dipandang perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh UPT Monitor di daerah guna memberikan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi secara umum.

Kegiatan penertiban dilakukan sebagai amanat UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Disamping itu, kegiatan penertiban ini terkait dengan Hukum Acara Pidana sehingga dilakukan berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan kegiatan penertiban serentak sebagai suatu rangkaian dari proses manajemen spectrum mau pun alat perangkat telekomunikasi.

Pelaksanaan Pekan Tertib Frekuensi 2021 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk menggunakan frekuensi radio secara legal. Kegiatan penertiban serentak secara nasional ini menargetkan jumlah gangguan spectrum frekuensi radio berkurang sebagai akibat dari pengguna yang tidak memiliki izin spectrum frekuensi radio dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis.

Penertiban serentak secara nasional ini menyasar 3 (tiga) kelompok pengguna frekuensi, yaitu (1) pengguna frekuensi yang tidak dilengkapi dengan data perizinan, (2) pengguna frekuensi yang beroperasi tidak sesuai dengan peruntukannya, serta (3) pengguna frekuensi yang berpotensi menimbulkan gangguan atau membahayakan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, objek penertiban mencakup Dinas Siaran (televise atau radio FM). Dinas Tetap (microwave link atau radio komunikasi konvensional), dan Dinas Lainnya serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melaksanakan kegiatan peneriban nasional pada 5 (lima) kabupaten/kota wilayah kerja, antara lain Kota Makassar, Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone.

Pekan Tertib Frekuensi Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar berhasil melakukan klarifikasi dan penghentian 58 pancaran frekuensi tanpa izin atau ilegal dan 4 perangkat tidak bersertifikat yang diamankan. Berikut ini daftar pengguna frekuensi ilegal yang diperoleh Kota Makassar, Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone

Rekapitulasi Hasil Penertiban Nasional Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar Tahun 2021

No	Pelaksanaan Penertiban Nasional	Kab/Kota	Pengguna	Jenis Pelanggaran				Tindakan	Keterangan
				Tidak ada ISR	Tidak Sesuai ISR	Ber-ISR	Off Air		
1	Tahap 1	Makassar	MW Link	0	0	0	5	BA Inspeksi	
2	Tahap 1	Jeneponto	MW Link	0	0	0	1	BA Inspeksi	
3	Tahap 1	Bone	MW Link	1	0	0	1	BA Inspeksi	
4	Tahap 1	Bulukumba	MW Link	0	1	5	4	BA Inspeksi	Bandwidth layanan seluler 450 MHz pada site Bulukumba melebar (belum dilakukan penyegelan)
5	Tahap 2	Pare-Pare	Maritim	1	3	0	0	Pengamanan Perangkat	
6	Tahap 2	Pare-Pare	Amatir	1	0	3	0	Surat Pernyataan	3 Melakukan Racing Frekuensi, 1 Tanpa ISR telah Off Air
7	Tahap 3	Makassar	Bergerak	12	0	0	0	1 Segel di tempat, 11 surat pernyataan	Surat pernyataan untuk mengurus ISR
8	Tahap 3	Makassar	BWA 5.8	1	0	0	0	1 Mikrotik disegel di tempat	Tidak memiliki Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet
9	Tahap 3	Barru	Bergerak	5	2	0	0	5 HT diamankan, 2 surat pernyataan	Surat pernyataan untuk mengurus ISR dan menggunakan frekuensi sesuai ISR
10	Tahap 3	Barru	Siaran	1	0	0	0	1 Radio siaran disegel di tempat	Akan mengurus izin lembaga penyiaran khusus
11	Tahap 4	Makassar	PT. Telkomsel	2	0	0	0	2 Segel ditempat	Surat pernyataan dan berita acara penyegelan



12	Tahap 4	Makassar	PT. Telekomunikasi Indonesia	8	0	0	0	2 Segel ditempatkan, 6 perangkat diamankan di kantor Balmon Makassar	Surat pernyataan dan berita acara penyegelan
13	Tahap 4	Makassar	PT. H3I	2	2	0	0	4 Segel ditempatkan	Surat pernyataan dan berita acara penyegelan
14	Tahap 4	Makassar	PT. Indosat	2	0	0	0	2 perangkat diamankan di kantor Balmon Makassar	Surat pernyataan dan berita acara penyegelan
15	Tahap 4	Makassar	PT. XL Axiata	1	0	0	0	1 perangkat diamankan di kantor Balmon Makassar	Surat pernyataan dan berita acara penyegelan
16	Tahap 4	Gowa	PT. XL Axiata	1	0	0	0	1 perangkat diamankan di kantor Balmon Makassar	suratpernyataan dan berita acara penyegelan
17	Tahap 4	Gowa	PT. Telkomsel	8	0	0	0	2 disegel di tempat, 4 perangkat diamankan di kantor Balmon Makassar	Surat pernyataan dan berita acara penyegelan
18	Tahap 4	Gowa	PT. Telekomunikasi Indonesia	2	0	0	0	2 Segel ditempatkan	Surat pernyataan dan berita acara penyegelan
19	Tahap 4	Bone	PT. Telkomsel	6	2	0	0	4 Segel ditempatkan, 4 perangkat diamankan di kantor Balmon Makassar	Surat pernyataan dan berita acara penyegelan
20	Tahap 4	Bone	PT. Telekomunikasi Indonesia	4	8	0	0	2 segel ditempatkan, 2 perangkat diamankan di kantor Balmon Makassar, 6 frekuensi disesuaikan dengan ISR, 2 tidak aktif (off air)	suratpernyataan dan berita acara penyegelan
TOTAL				58	18	8	11		

Tabel 2 : Hasil Penertiban Nasional Balai Monitor SFR Kelas I Makassar Tahun 2021

PENANGGUNG JAWAB

- HELMI WARTAPANE

TIM PENYUSUN

KETUA

- MUH. SYAHID MASYHUDI

PENYUSUN

- NUR FAJRI RAHMA YANI AGUSSALIM
- DEWI ARISYANTI
- FAHRUR ROZI
- DEDY MULYADI
- SITI ASNAWATI
- ANDI SYAMSUL ALAM
- DEWI SARTIKA

EDITOR

- NUR FAJRI RAHMA YANI AGUSSALIM

PHOTOGRAFER

- NUR ASYWIN SYAH
- SALMAN ALFARIZI

DESAIN & LAYOUT

- HAJAR IKIE

 Balmon Makassar

 balmon_makassar





KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	
A. Pencapaian PK UPT	iii
B. Pencapaian Penertiban Nasional Untuk Frekuensi Radio	xi
TIM PENYUSUN	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	7
C. Potensi dan Permasalahan Strategis	10
D. Sistematika Pelaporan	12
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
A. Sasaran Program	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
Sasaran I Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	

1. Persentase (%) pengukuran stasiun radio dan televisi siaran diwilayah kerja	27
2. Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	31
3. Persentase (%) jumlah ISR yang termonitor	37
4. Persentase (%) hasil monitoring frekuensi yang teridentifikasi	39
5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukut di UPT	40
6. Persentasi (%) penanganan gangguan spketrum frekuensi radio	44
7. Persentase (%) penertiban spektrum frekuensi radio	45
8. Monitoring sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi	47
9. Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	49
10. Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik	51
11. Persentase (%) pelaksanaan ujian negara amatir radio berbasis CAT	52
12. Persentase (%) pelaksanaan dan penanganan piutang BHP frekuensi radio	54
13. Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR maritim nelayan	57
14. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	59

Sasaran II Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efisien, dan Efektif	60
Nilai Kinerja Anggaran SDPPI	
B. Kinerja Lainnya	63
C. Keuangan dan Realisasi Anggaran	64
D. Kepegawaian dan Umum	71
 BAB III PENUTUP	
Kesimpulan	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021	v
Tabel 2	Hasil Penertiban Balai Monitor SFR Kelas I Makassar Tahun 2021	xiv
Tabel 2.1	Target dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang Terukur	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	31
Tabel 3.3	Data Pita Frekuensi Penugasan Monitoring Frekuensi Radio di UPT Tahun 2021	32
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Persentase (%) Jumlah ISR Termonitor	37
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Persentase (%) Jumlah Hasil Monitoring yang Teridentifikasi	39
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	40
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT 5 Tahun Terakhir	41
Tabel 3.8	Laporan Service Level Agreement (SLA) Tahun 2021	43
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	44
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Indikator Persentase(%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	45

Tabel 3.11	Capaian Kinerja Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	47
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Indikator Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	49
Tabel 3.13	Hasil Penertiban Sertifikasi Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan	50
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	51
Tabel 3.15	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Radio Tahun 2021	51
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT	52
Tabel 3.17	Hasil Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT Tahun 2021	53
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Pelaksanaan dan Penanganan Piutang BHP	54
Tabel 3.19	Daftar Pelimpahan Piutang KPKNL Tahun 2021	55
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan	57
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR	59
Tabel 3.22	Resume Hasil Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Tahun 2021	60
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran SDPPI	61

Tabel 3.24	Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran SDPPI 5 Tahun Terakhir	61
Tabel 3.25	Pagu Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2021	65
Tabel 3.26	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	66
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017-2021	69
Tabel 3.28	Daftar ASN Tahun 2021	71
Tabel 3.29	Daftar PPNN Tahun 2021	73
Tabel 3.30	Daftar Petugas Keamanan Tahun 2021	74
Tabel 3.31	Daftar Cleaning Service Tahun 2021	74
Tabel 3.32	Daftar Sopir Tahun 2021	75
Tabel 3.33	Daftar Kenaikan Pangkat Tahun 2021	75
Tabel 3.34	Daftar Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2021	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Ditjen SDPPI	9
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	10
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
Gambar 3.1	Radio FM dan TV di Provinsi Sulawesi Selatan	28
Gambar 3.2	Realisasi Stasiun Siaran Terukur Tahun 2021	29
Gambar 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir Indikator Kinerja Stasiun Radio	30
Gambar 3.4	Realisasi Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	34
Gambar 3.5	Grafik Rata-Rata Pendudukan Spektrum Frekuensi Radio pada 18 Pita di Provinsi Sulawesi Selatan	35
Gambar 3.6	Grafik Capaian Kinerja Indikator Persentase Okupansi Kabupaten/Kota Termonitor Kurun Waktu 5 Tahun	36
Gambar 3.7	Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	38
Gambar 3.8	Grafik Target ISR Termonitor di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	38
Gambar 3.9	Grafik Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar Indikator ISR Termonitor	39

Gambar 3.10	Lokasi Stasiun Monitor Transportable dan Stasiun Tetap	42
Gambar 3.11	Grafik Kasus Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021	44
Gambar 3.12	Grafik Realisasi Hasil Monitoring Ilegal Yang ditindak lanjuti	46
Gambar 3.13	Grafik Hasil Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi TA. 2021	48
Gambar 3.14	Jumlah Penyampaian SPP BHP Frekuensi Radio	55
Gambar 3.15	Capaian Izin Stasiun Radio (ISR) Tahun 2021	58
Gambar 3.16	Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021	62
Gambar 3.17	Capaian Nilai IKPA Tahun Anggaran 2021	63
Gambar 3.18	Piagam Penghargaan IKPA Semester I Tahun Anggaran 2021	64
Gambar 3.19	Komposisi Pagu Anggaran Per Komponen Tahun 2021	66
Gambar 3.20	Grafik Jumlah Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021	67
Gambar 3.21	Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021	68
Gambar 3.22	Grafik Disbursement Plan Tahun 2021	69
Gambar 3.23	Neraca Per 31 Desember 2021	70





BAB I







PENDAHULUAN







Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Taknis (UPT) Bidang monitoring frekuensi radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2020-2024. Salah satu Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital. Program-program pemerintah juga telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap Akhir adalah ***"terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis"***.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Dalam bidang infrastruktur, program pembangunan infrastruktur RPJMN 2020-2024 diarahkan pada tiga pilar, yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar;
2. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi; dan
3. Pembangunan Infrastruktur Perkotaan.

Salah satu Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui pemerataan infrastruktur



TIK, pemanfaatan infrastruktur TIK dan pengembangan enabler transformasi digital. Program-program pemerintah juga telah disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Ditjen SDPPI dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance*.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal SDPPI, pembinaan administrasi di bawah koordinasi Sekretariat Ditjen SDPPI dan pembinaan teknis operasional di bawah koordinasi Direktorat Pengendalian SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka

melaksanakan misi dan mencapai visi Ditjen SDPPI dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai alat untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholders* demi perbaikan kinerja Ditjen SDPPI dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Lebih rinci tugas pokok setiap seksi, antara lain :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
2. Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
3. Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio, pelayanan

pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
6. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio;
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; dan
10. Pelaksanaan Maritim On The Spot.

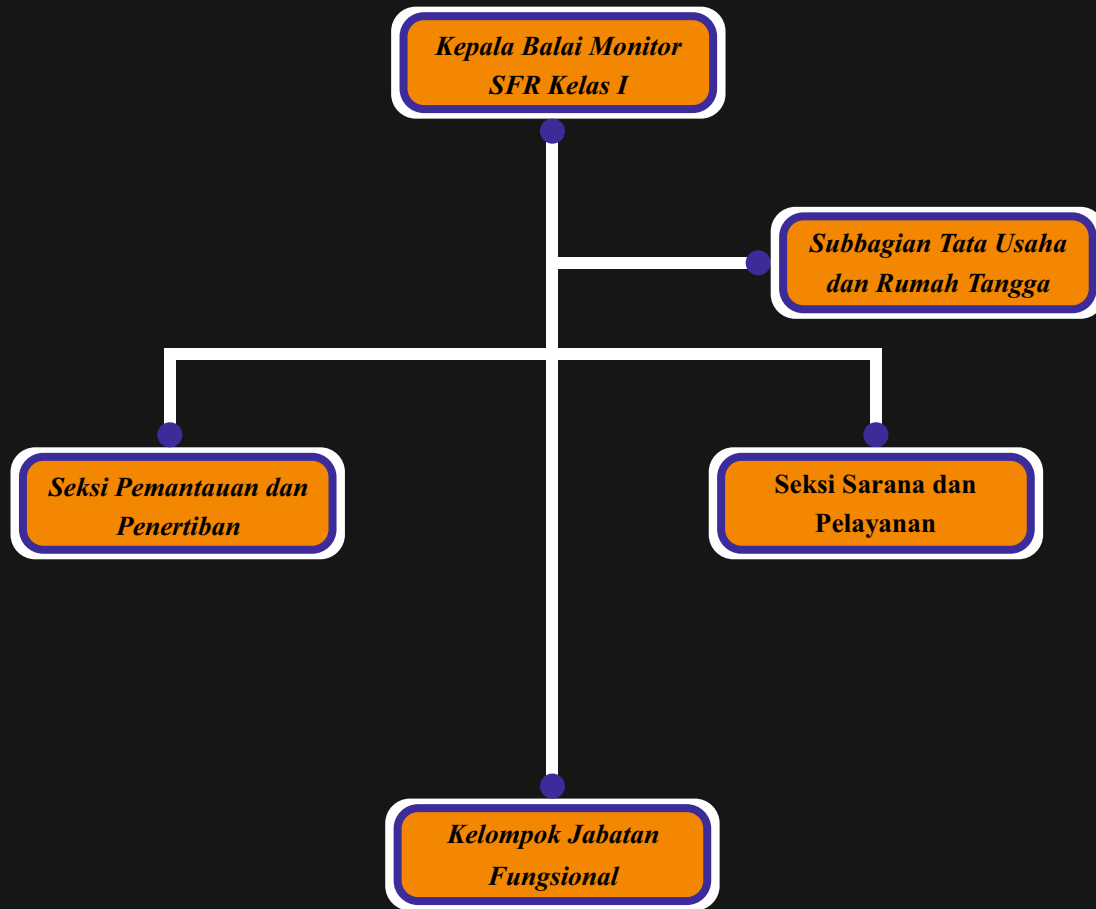
Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah unit kerja setingkat eselon satu yang menjalankan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Ditjen SDPPI
Sumber : www.postel.go.id

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

C. Potensi dan Permasalahan Strategis

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan yang memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel (*wireless broadband*). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel serat optik. Adanya transformasi

digital dan layanan broadband terutama *wireless broadband* akan menyebabkan terjadinya ledakan kebutuhan *bandwidth* yang berdampak pada kebutuhan alokasi spektrum frekuensi yang besar, kinerja industri, kebutuhan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan ekosistem industri secara menyeluruh.

Perkembangan Teknologi dan layanan TIK yang pesat telah berdampak pada perubahan industri TIK secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari adanya transformasi perubahan industri yang mengarah pada digitalisasi industri. Transformasi perubahan industri tersebut didorong oleh adanya inovasi dan kreativitas industri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan penciptaan layanan TIK yang bervariasi sesuai kebutuhan pasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perangkat SMFR pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar perlu ditingkatkan atau di upgrade yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
2. Penguatan dalam hal perencanaan anggaran dan kegiatan yang perlu ditingkatkan agar seluruh kegiatan program kerja dapat berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
3. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (*capacity building*) di bidang teknis dan administrasi perlu ditingkatkan.

4. Belum optimalnya informasi mengenai proses perizinan spektrum frekuensi radio kepada masyarakat.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga perlu ditingkatkan serta diperbaharui sesuai dengan kemajuan teknologi.
6. Gangguan interferensi frekuensi radio yang masih sering terjadi.

D. Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
2. Perencanaan Kinerja yang berisi penjelasan ringkas mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2020.
3. Akuntabilitas Kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
4. Penutup yang berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.



BAB II

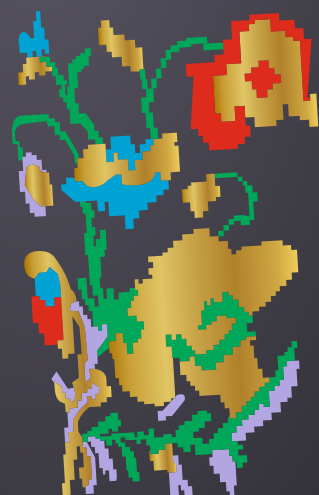
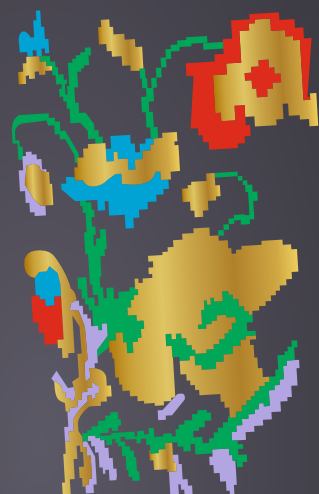






PERJANJIAN KINERJA







A. Sasaran Program

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara - negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya sasaran program 2020 – 2024 yang disusun oleh Ditjen SDPPI, yaitu :

- SP.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBPN Ditjen SDPPI
- SP.2 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio



- SP.3 Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
- SP.4 Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK
- SP.5 Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Perjanjian Kinerja Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Wartapane

Jabatan : Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ismail

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kerja 2021), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ismail Digitally signed
by Ismail

Ismail

Helmi Wartapane

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	1. Persentase pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja	50%
		2. Persentase Okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota	80%
		3. Persentase jumlah ISR yang termonitor	70%
		4. Persentase ISR hasil monitoring yang teridentifikasi	90%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85%
		6. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97%
		7. Persentase penertiban spektrum frekuensi radio	70%
		8. Monitoring sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	3 kegiatan
		9. Penertiban sertifikat alat/perangkat telekomunikasi	1 kegiatan
		10. Persentase pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	80%
		11. Persentase Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%
		12. Persentase pelaksanaan pencegahan dan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		13. Persentase pelaksanaan sosialisasi dan atau SRC/LRC dan jumlah ISR Maritim Nelayan	90%
		14. Persentase pelaksanaan inspeksi stasiun radio terkait validasi data ISR	90%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI	86

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Frekuensi dan Perangkat TIK	Rp. 19.254.226.000,-

Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,

Ismail Digitally signed
by Ismail
Ismail

Jakarta, Juli 2021

Kepala Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas I Makassar


Helmi Wartapane

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja disusun untuk menciptakan tolak ukur penilaian atas kinerja UPT sehingga dapat dilakukan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja dan target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian 2021	Persentase
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	1. Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja	50	82.82%	165.65%
		2. Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio Ii Kabupaten/Kota	80	91.67%	114.58%
		3. Persentase (%) Jumlah ISR yang Termonitor	70	75.84%	108.35%
		4. Persentase (%) ISR Hasil Monitoring yang Teridentifikasi	90	100%	111.11%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85%	91.89%	108.10%
		6. Persentase (%) Penanganan	97	100%	103.09%



			Gangguan Spektrum Frekuensi Radio			
		7.	Persentase (%) Penertiban Frekuensi Radio	70	77.14%	100%
		8.	Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan	9 Kegiatan	300%
		9.	Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%
		10.	Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	80	100%	125%
		11.	Persentase (%) Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT	100	100%	100%
		12.	Persentase (%) Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100	100%	100%
		13.	Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan	90	141.05%	156.72%



2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	14.	Persentase (%) Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR	90	92.78%	103.08%
			Nilai Kinerja Anggaran SDPPI	86	96.38	112.06%

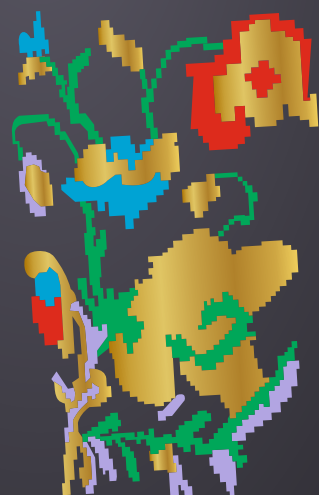
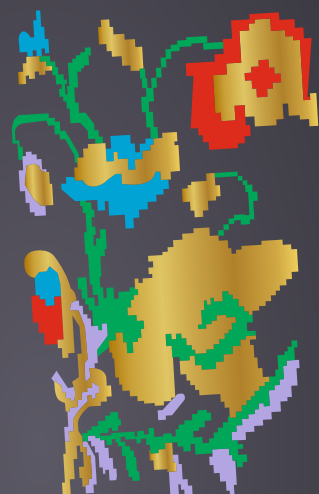
Tabel 2.1 Target dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp18.229.886.000,- (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang kemudian mengalami pengurangan pagu menjadi Rp. 18.059.645.000,- (Delapan Belas Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian Balai Monitor SFR Kelas I Makassar mendapat tambahan dana dari pusat sehingga jumlah pagu menjadi Rp. 19.254.226.000,- (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



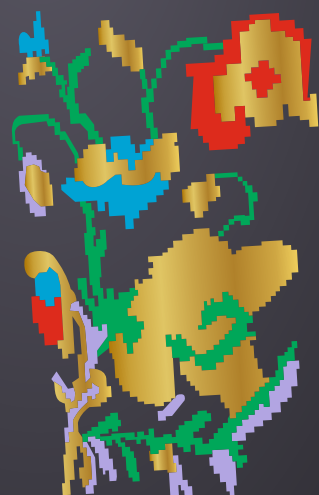
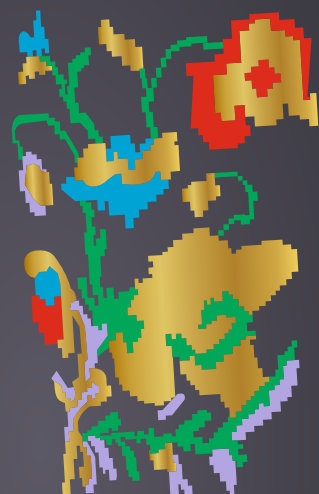
BAB III







AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap Capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

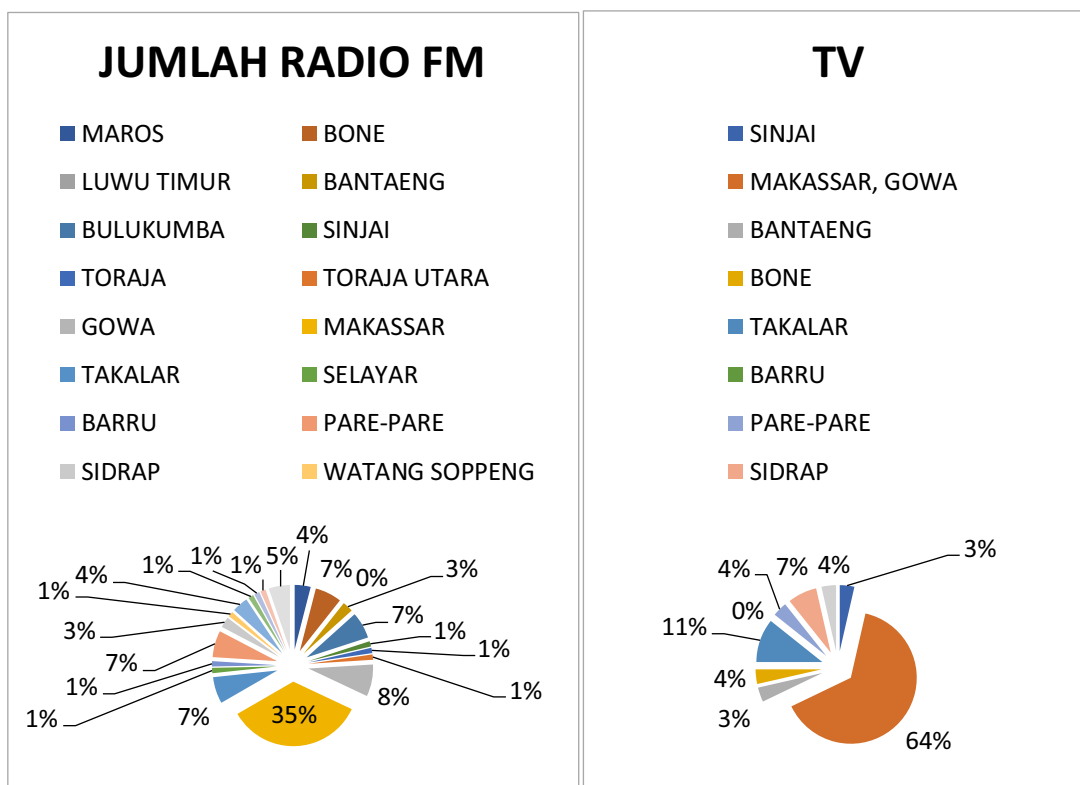
1. Persentase (%) Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran di Wilayah Kerja

Indikator kinerja pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja sebesar 82,82% dari target sebesar 50% dengan persentase capaian sebesar 165,65%.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Presentases tasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	50 %	82,82 %	165,65%

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Indikator Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang Terukur

Pada layanan Siaran, khususnya subservis Radio FM dan TV di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki total 99 penyelenggaraan Radio Siaran FM dan TV yang ber-ISR. Penyelenggara ber-ISR tersebut terdiri atas 72 ISR penyelenggara Radio FM dan 27 ISR penyelenggara TV. Berdasarkan data tersebut, maka target Radio FM dan TV yang harus terukur pada tahun 2020 adalah sebanyak 50 stasiun Radio FM dan TV.

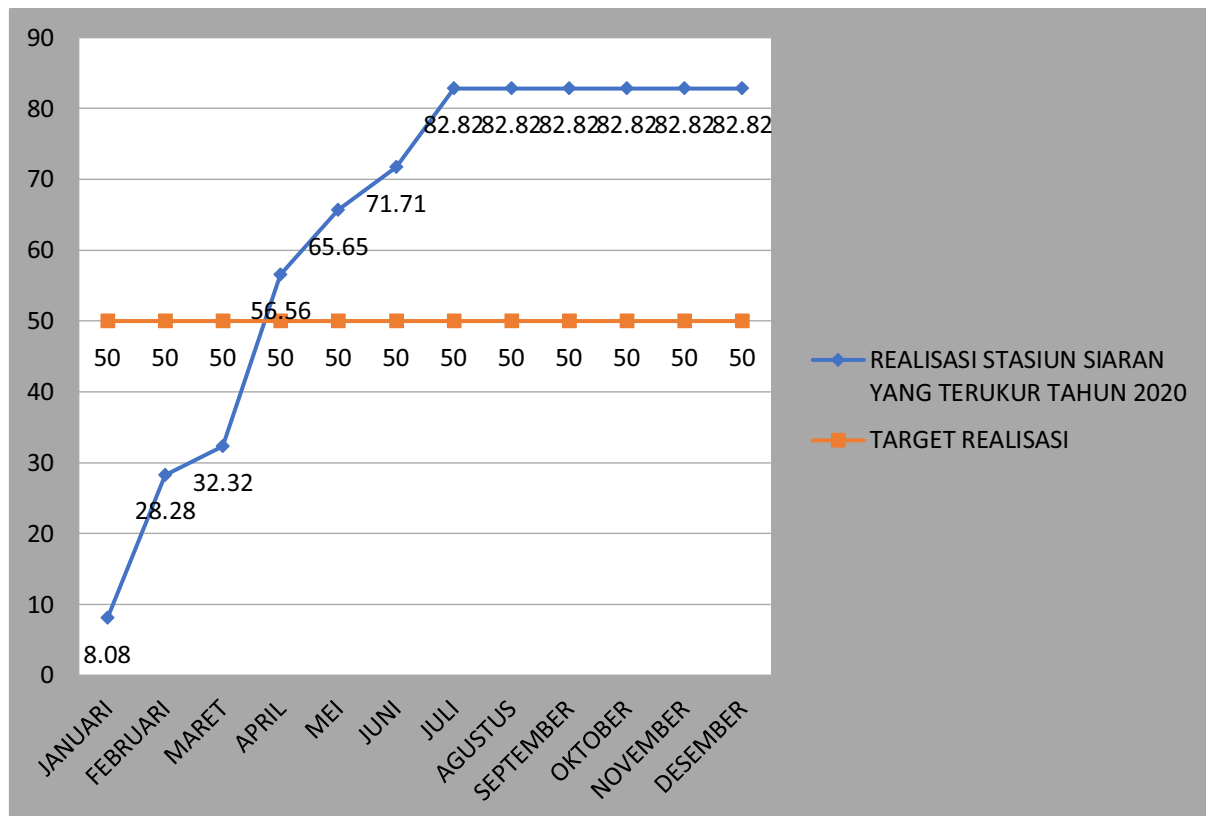


Gambar 3.1. Radio FM dan TV di Provinsi Sulawesi Selatan

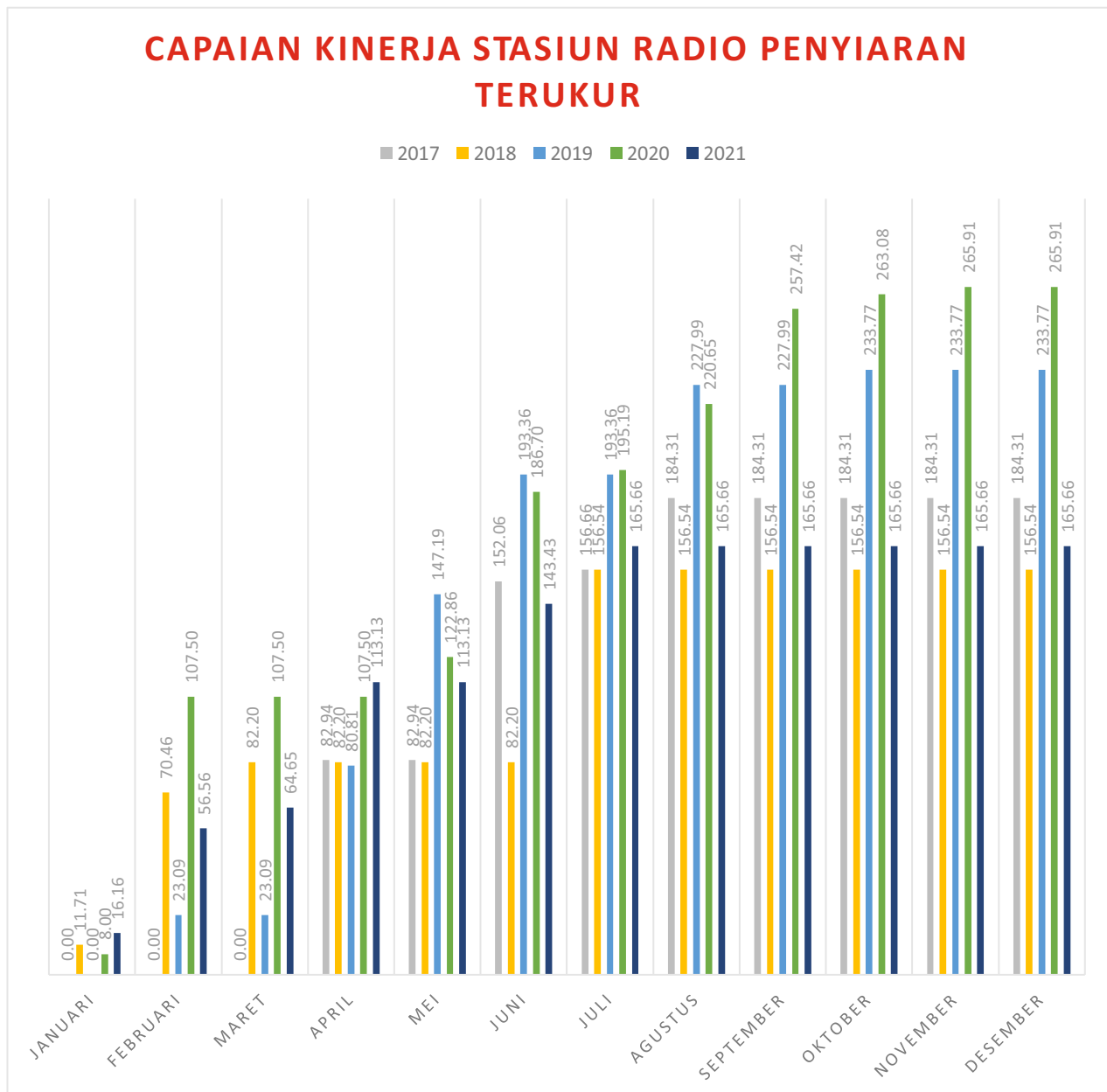
Dari Gambar 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Radio FM dan TV yang ber-ISR paling banyak terdapat di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sehingga untuk mencapai target untuk indikator ini maka pengukuran di kedua daerah ini lebih diutamakan. Selain kedua daerah tersebut, pengukuran dilakukan pula di beberapa kabupaten/kota lainnya sehingga stasiun Radio FM dan TV terukur hingga bulan Desember sebanyak 82 stasiun (82.82%). Oleh karenanya Capaian Balai Monitor

Makassar untuk Indikator Presentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur sebesar 165.65% dari target yang telah ditetapkan.

REALISASI STASIUN SIARAN TERUKUR TAHUN 2021



Gambar 3.2. Realisasi Stasiun Siaran Terukur Tahun 2021



Gambar 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir Indikator Kinerja Stasiun Radio

Dari Gambar 3.3 terlihat bahwa jika membandingkan Capaian Kinerja 5 Tahun terakhir, maka target stasiun radio penyiaran terukur paling cepat tercapai pada tahun 2020, yaitu pada bulan Februari. Target untuk Indeks Kinerja ini sejak tahun 2017 adalah sama sebesar 35 % kemudian meningkat menjadi 50% pada tahun 2021. Jumlah lembaga penyiaran yang harus diukur kian tahun semakin bertambah.

Pada Tahun 2017 Stasiun Radio Siaran di Kota Makassar hanya sebanyak 62 stasiun Radio FM dan TV Siaran, kemudian meningkat menjadi 71 stasiun siaran pada tahun 2018 pada Tahun 2019 meningkat sangat signifikan menjadi 98 stasiun siaran, pada tahun 2020 menjadi 101 stasiun, kemudian menurun menjadi 99 pada tahun 2021.

Pengukuran Karakteristik Radio Siaran dan TV Siaran ini bertujuan agar para lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan siarannya sesuai dengan aturan, yaitu PermenKominfo No. 3 Tahun 2017 untuk Radio Siaran FM dan PermenKominfo No. 31 Tahun 2014 untuk TV Siaran UHF. Apabila hasil ukur menunjukkan adanya pelanggaran, maka Balmon Kelas I Makassar segera memberi peringatan untuk menyesuaikan parameter teknisnya sebagai upaya pencegahan timbulnya gangguan frekuensi radio utamanya frekuensi penerbangan.

2. Persentase (%) Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Indikator kinerja okupansi penggunaan frekuensi radio di kabupaten/kota terlaksana sebesar 91,67% dari target sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 114,58%.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	80 %	91,67 %	114,58%

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Indikator Persentase Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota merupakan salah satu hasil dari kegiatan Observasi dan monitoring yang bertujuan untuk memantau penggunaan spectrum frekuensi pada pita sub-service tertentu di wilayah kabupaten/kotadengan menggunakan sarana perangkat monitor *portabel* dan bergerak melalui pengamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam per *subservice* pita dengan merekam kanal, level sertawaktu pendudukannya.

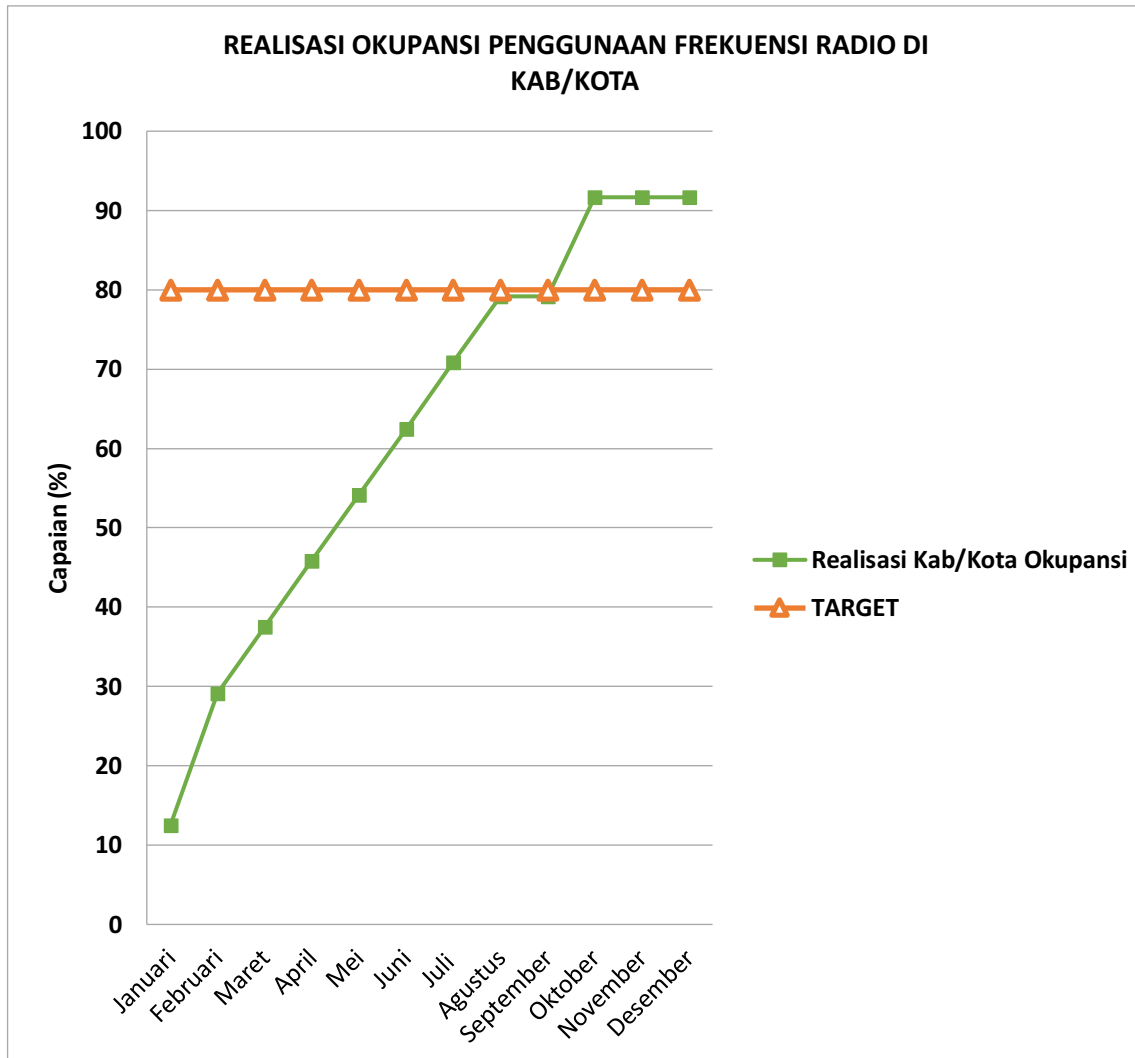
Direktorat Pengendalian SDPPI melalui nota dinas nomor : 358/Dj-SDPPI.4/SP.03.03/03/2021 menyampaikan 18 *subservice*/pita frekuensi yang harus dimonitor selama tahun 2021 oleh setiap UPT Ditjen SDPPI melalui kegiatan Observasi Monitoring (pengamatanokupansi) dan pengukuran parameter teknis. Adapun 18 *subservice*/pita frekuensi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	Subservice	Pita Frekuensi
1	Maritim, Marabahaya (479 – 526.5 kHz)	479 – 526.5KHz
2	Radio AM (535 – 1606.5 kHz)	535 – 1606.5 KHz
3	Marabahaya (2173.5 – 2190.5 kHz)	2173.5 – 2190.5 KHz
4	PenerbanganHF ,Amatir(5450 – 11400 KHz)	5450 – 11400 KHz
5	Maritim HF (26100 – 26175 KHz)	26100 – 26175 KHz
6	Radio FM (87.5 – 108 MHz)	87.5 – 108 MHz
7	Penerbangan VHF (108 – 137 MHz)	108 – 137 MHz
8	Konsesi, Maritim VHF (150 – 174 MHz)	150 – 174 MHz
9	Televisi VHF, DAB+ (174 – 230 MHz)	174 – 230 MHz
10	Tetap, Bergerak, Marabahaya (300 – 430 MHz)	230 – 430 MHz
11	Komrad (430 – 460 MHz)	430 – 460 MHz
12	Downlink Seluler 450 (460 - 470 MHz)	460 – 470 MHz

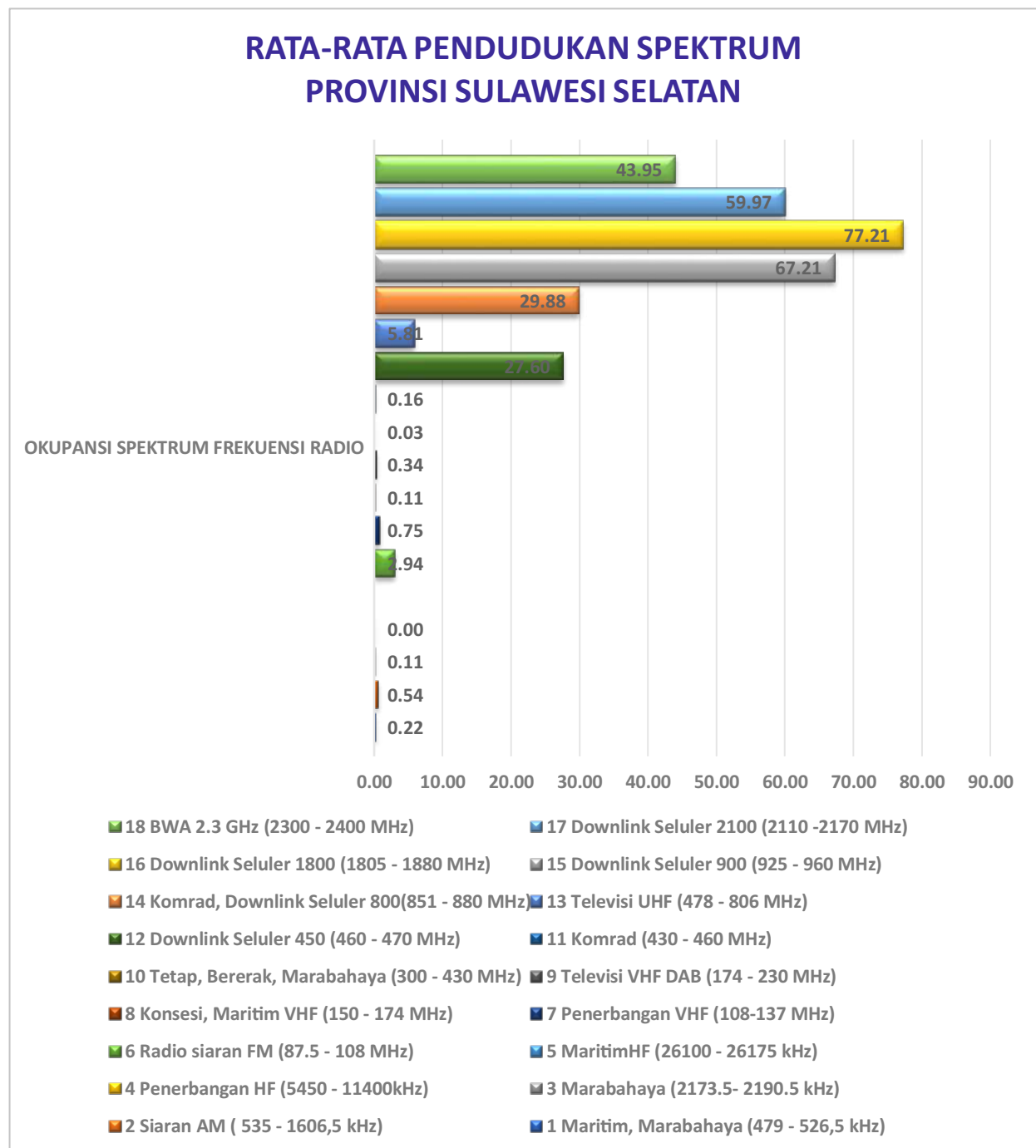
13	Televisi UHF (478 – 806 MHz)	478 – 806 MHz
14	Komrad ,DownlinkbSeluler 800 (851 – 880 MHz)	851 – 880 MHz
15	Downlink Seluler 900 (925 – 960 MHz)	925 – 960 MHz
16	Downlink Selular 1800 (1805 – 1880 MHz)	1805 – 1880 MHz
17	Downlink Selular 2100 (2110 – 2170 MHz)	2110 – 2170 MHz
18	Seluler Broadband 2300 (2300 - 2400 MHz)	2300 – 2400 MHz

Tabel 3.3. Data Pita Frekuensi Penugasan Monitoring Frekuensi radio di UPT tahun 2021

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 Kab/Kota, sehingga untuk mencapai target 80%, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar harus melakukan okupansi minimal di 20 Kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tahun 2021, target tersebut telah tercapai pada bulan Agustus 2021. Hingga akhir tahun telah dilaksanakan Okupansi Spektrum frekuensi Radi di 22 Kabupaten/kota sehingga capaian Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio sebesar 114,58% dari target yang telah ditetapkan Gambar 3.4).



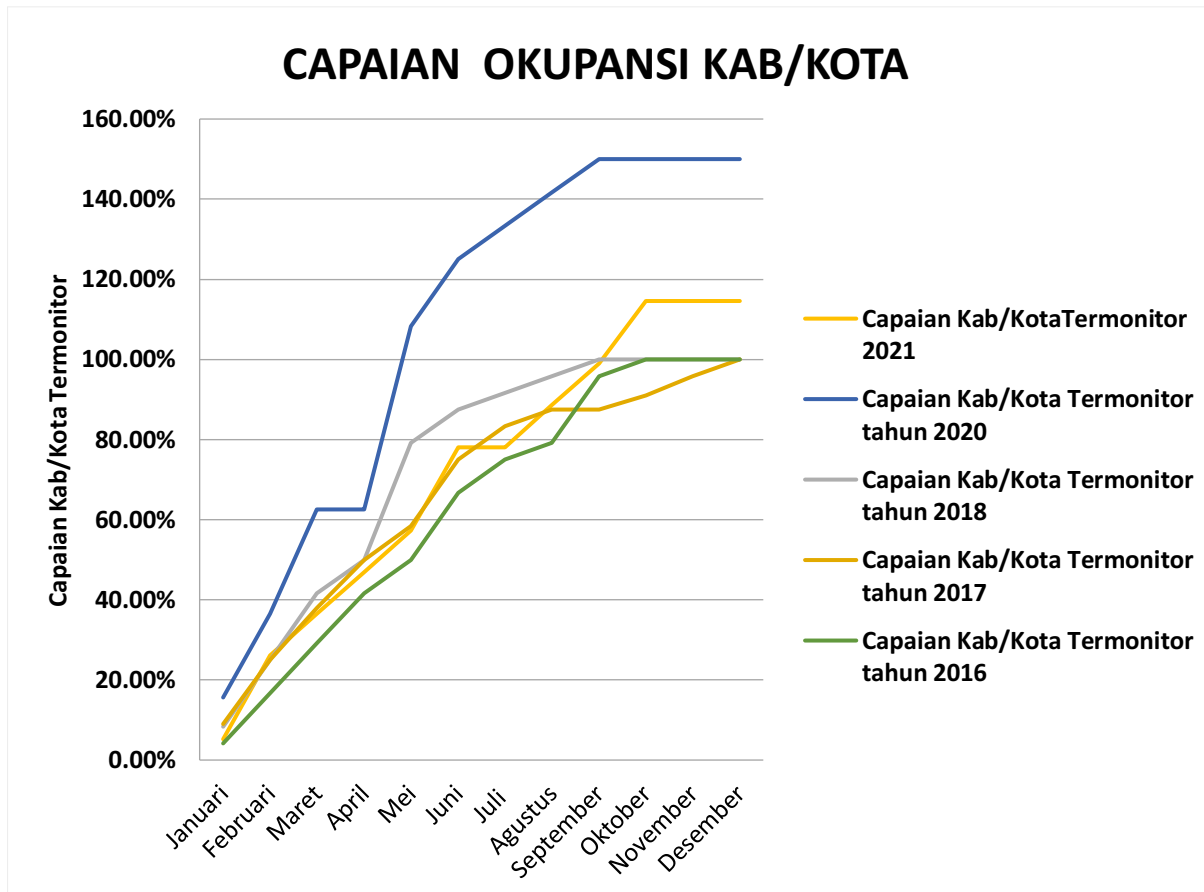
Gambar 3.4. Realisasi Okupansi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



Gambar 3.5. Grafik Rata-Rata Pendudukan Spektrum Frekuensi Radio Pada 18 Pita di provinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan Observasi Monitoring dengan menggunakan metode FBO (*Frequency Band Occupancy*) diperoleh nilai rata-rata pendudukan spektrum di Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat pada Gambar 3.5. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pita

Downlink seluler 1800 (1805 – 1880 MHz) memiliki tingkat kepadatan penggunaan spectrum frekuensi radio, yaitu sebesar 77,21 % dan yang paling rendah adalah pada pita Penerbangan HF (5450 – 11400 kHz) sebesar 0 %.



Gambar 3.6. Grafik Capaian Kinerja Indikator Persentase Okupansi Kabupaten/Kota Termonitor Kurun Waktu 5 Tahun.

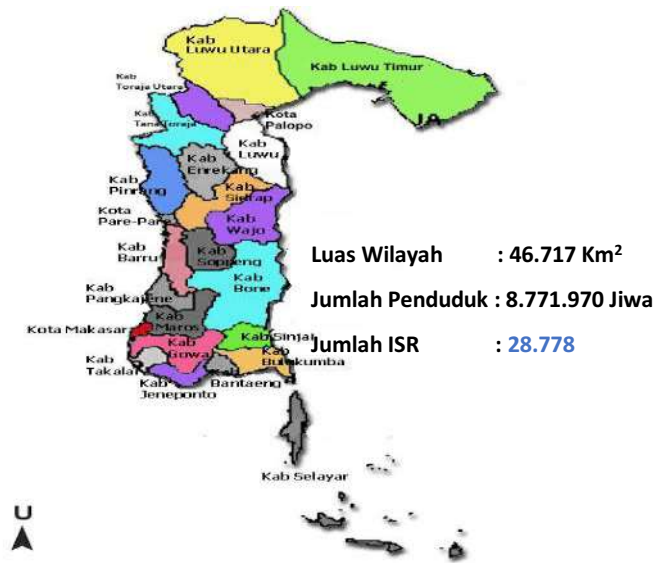
Perbandingan capaian Okupansi Kabupaten/Kota Termonitor untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 3.6. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa capaian kinerja paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 150%.

3. Persentase (%) Jumlah ISR yang Termonitor

KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
	KINERJA			CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Presentase Jumlah IST yang Termonitor	70 %	75,84 %	108,35%

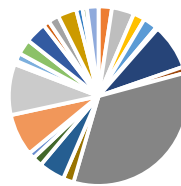
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Indikator Presentase Jumlah ISR yang termonitor

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kabupaten/kota, memiliki luas wilayah 46.717 Km². Dengan wilayah kerja yang cukup luas, jumlah pengguna frekuensi yang memiliki ISR sebanyak 28.778 dengan tingkat kepadatan pengguna frekuensi radio paling banyak terdapat di Kota Makassar sebesar 33,71 % (209 ISR). Untuk Target ISR termonitor pada tahun 2021, dititikberatkan pada dinas Siaran, Konsesi dan Trunking sebanyak 621 ISR.



Gambar 3.7. Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

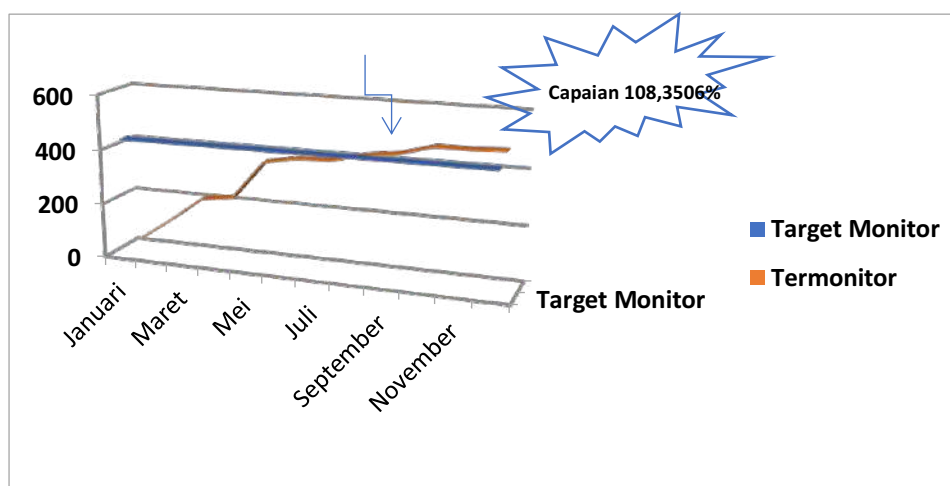
JUMLAH TARGET ISR TERMONITOR



- | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| ■ KAB/KOTA | ■ BANTAENG | ■ BONE |
| ■ BULUKUMBA | ■ JENEPONTO | ■ ENREKANG |
| ■ GOWA | ■ KEPULAUAN SELAYAR | ■ KOTA MAKASSAR |
| ■ KOTA PALOPO | ■ KOTA PAREPARE | ■ LUWU |
| ■ LUWU UTARA | ■ LUWU TIMUR | ■ MAROS |
| ■ PANGKAJENE KEPULAUAN | ■ BARRU | ■ PINRANG |
| ■ SIDENRENG RAPPANG | ■ SINJAI | ■ SOPPENG |
| ■ TAKALAR | ■ TORAJA UTARA | ■ TANA TORAJA |

Gambar 3.8 Grafik Target ISR Termonitor di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Target 70% ISR Termonitor tercapai pada bulan Oktober sebanyak 465 ISR telah dimonitor (Realisasi 74,88%), sehingga capaian kinerja untuk indikator ISR Termonitor hingga akhir tahun 2021 sebesar 108,35 %.



Gambar 3.9. Grafik Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar Indikator ISR Termonitor

4. Persentase (%) ISR Hasil Monitoring yang Teridentifikasi

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase ISR Hasil Monitoring yang Teridentifikasi	90 %	100 %	111,11%

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Indikator Persentase Jumlah Hasil Monitoring Frekuensi yang Teridentifikasi

Indikator Kinerja hasil monitoring yang teridentifikasi merupakan salah satu output dari kegiatan Observasi dan monitoring terhadap 18 pita frekuensi sesuai dengan nota dinas nomor: 358/Dj-SDPPI.4/SP.03.03/03/2021. Target Kinerja dari indikator ISR

Hasil Monitoring yang Teridentifikasi untuk TA. 2021 sebesar 90%, dimana realisasi setiap bulannya hingga akhir TA. 2021 sebesar 100 %, sehingga capaian kinerja mencapai 111,11%. Berdasarkan data Observasi dan Monitoring di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diupload melalui aplikasi ROL, telah termonitor hingga akhir TA. 2021 sebanyak 826 frekuensi dan semuanya telah teridentifikasi.

5. Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	85 %	91,89 %	108,10%

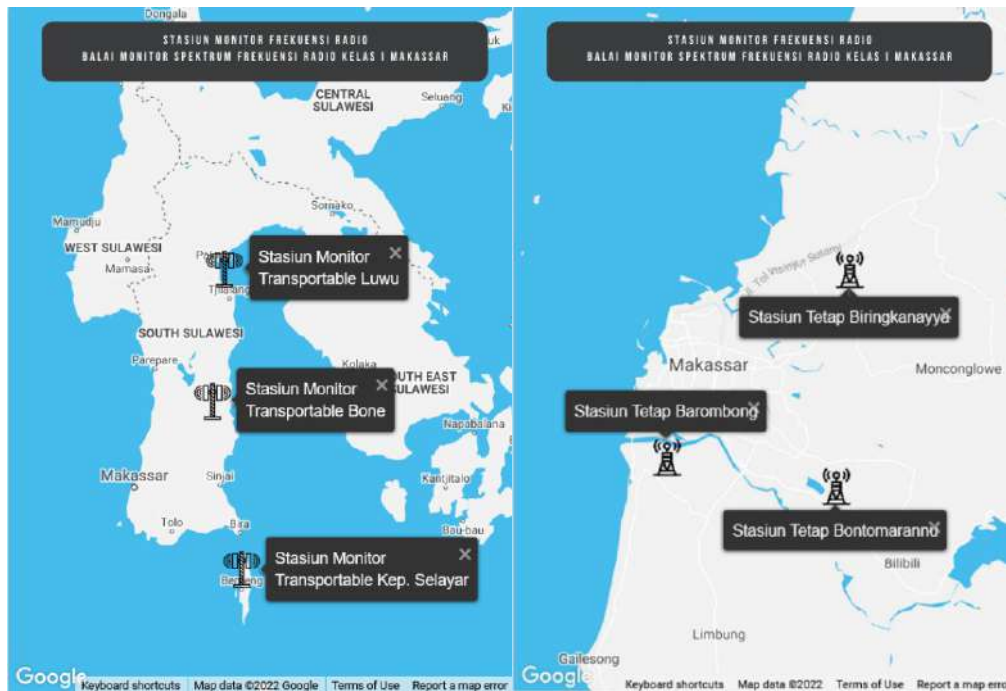
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT

Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	-	-	-	-	85%	96,10%

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	83%	91,50%	85%	91.89%

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT 5 Tahun Terakhir

Untuk mendukung kegiatan observasi dan monitoring, identifikasi, dan penanganan gangguan spectrum frekuensi radio khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mengelola dan mengoperasikan sebanyak 45 perangkat utama dan 148 perangkat pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) yang terdiri dari 3 (tiga) stasiun tetap, 3 (tiga) stasiun transportable, 1 (satu) stasiun bergerak, dan 7 (tujuh) perangkat jinjing (*Portable*).



Gambar 3.10 Lokasi Stasiun Monitor Transportable dan Stasiun Tetap

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT terlaksana sebesar 91,89% dari target sebesar 85% sehingga capaian untuk indicator kinerja ini sebesar 108,1%. Capaian kinerja ini didapatkan dari hasil inspeksi pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang dilaksanakan untuk memastikan setiap perangkat pendukung dapat bekerja dengan baik.

PERIODE	JUMLAH PERANGKAT	KONDISI PERANGKAT		% PERSENTASE
		BAIK	RUSAK	
Januari	140	125	15	89,29
Februari	144	128	16	88,89
Maret	148	146	2	98,65
April	148	143	5	96,62
Mei	148	143	5	96,62
Juni	148	140	8	94,59
Juli	148	139	9	93,92
Agustus	148	140	9	94,59
September	148	136	12	91,89
Oktober	148	139	9	93,92
November	148	139	9	93,92
Desember	148	136	12	91,89

Tabel 3.8 Laporan Service Level Agreement (SLA) Tahun 2021

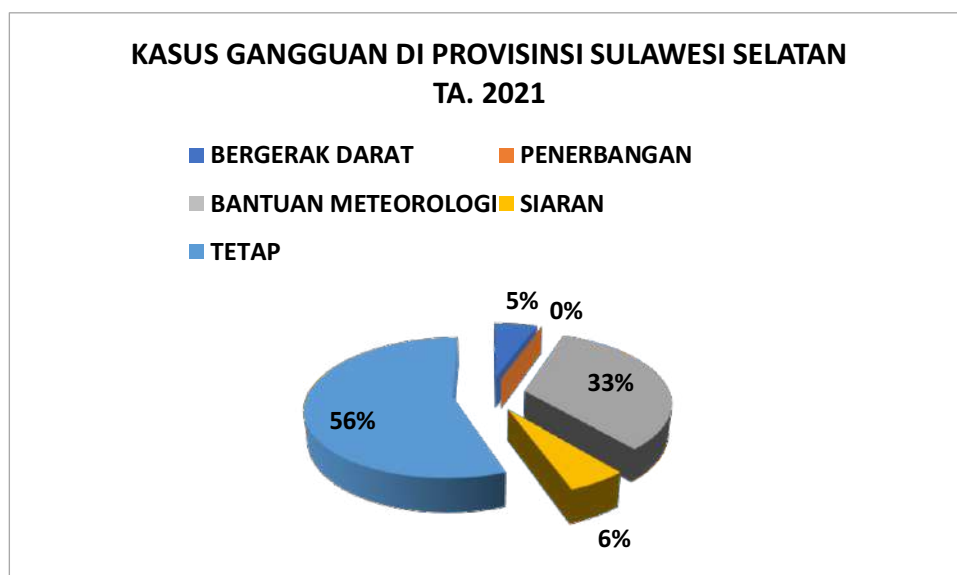
Dari tabel 3.8 terlihat bahwa rata rata kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT Balai Monitor SFR Kelas I Makassar mencapai angka diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa, kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dalam kondisi baik.

6. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
	KINERJA			CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	97 %	100 %	103,09%

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Selama tahun 2021 terdapat 18 (DelapanBelas) pengaduan gangguan yang ditangani oleh Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, dimana seluruh gangguan tersebut telah CLEAR. Jenis gangguan paling banyak terjadi pada Dinas Tetap sebesar 56 % dari total gangguan spectrum frekuensi radio.



Gambar 3.11. Grafik Kasus Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021

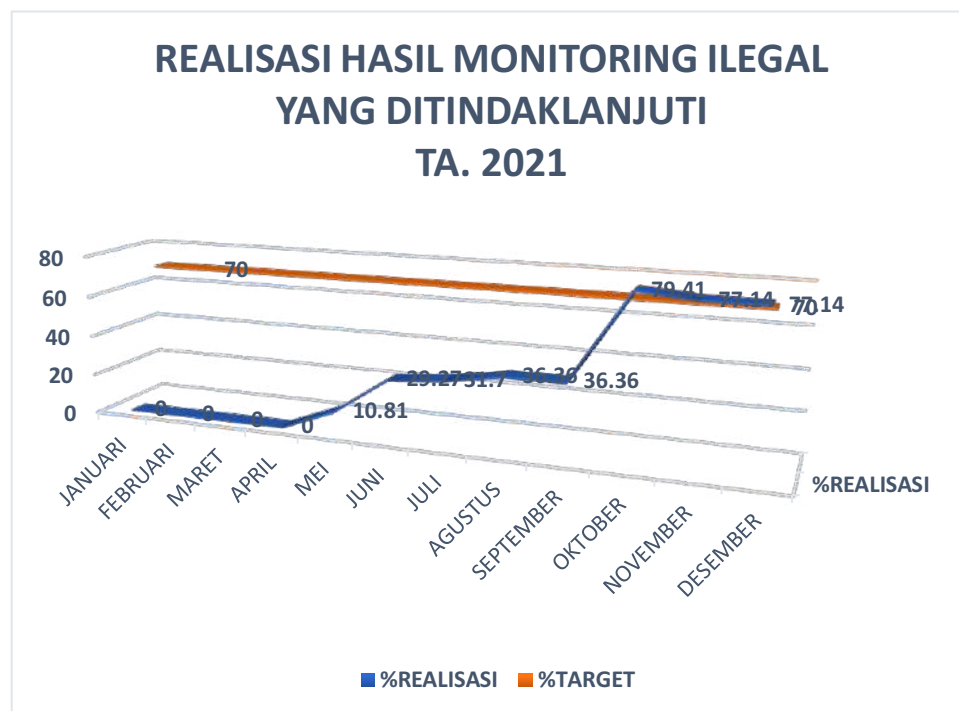
Target untuk indikator Penanganan gangguan spectrum frekuensi radio sebesar 97%, hingga akhir tahun 2021 realisasi kinerja untuk indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio 100% sehingga capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 103,09%.

7. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio	70 %	77,14 %	110,20%

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Indikator Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

Indikator kinerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio merupakan tindaklanjut dari kegiatan Observasi dan monitoring yang memiliki status Ilegal berupa penghentian pancaran (*off air*) atau pun terbit ISR. Target kinerja untuk indikator ini sebesar 70%.



Gambar 3.12. Grafik Realisasi Hasil Monitoring Ilegal Yang ditindaklanjuti

Dari gambar 3.12. dapat diketahui bahwa target kinerja dapat terlampaui pada bulan Oktober 2021 sebesar 79,41%. Hingga akhir tahun 2021 realisasi hasil monitoring ilegal yang telah ditindaklanjuti sebesar 77,14%, dimana 11 ilegal hasil monitor telah off air dan 26 telah terbit ISR dari 35 ilegal hasil monitor sehingga capaian kinerja indicator inisebesar 110,2%.

Tujuan dari menindaklanjuti hasil monitoring yang ilegal adalah sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gangguan frekuensi, utamanya untuk frekuensi penerbangan. Selain dari hasil monitoring yang ilegal yang ditindaklanjuti, hasil kegiatan selain monitoring seperti Inspeksi Stasiun Radio dalam rangka validasi data ISR dan penanganan gangguan juga ditindaklanjuti agar tertib frekuensi radio dapat tercapai.

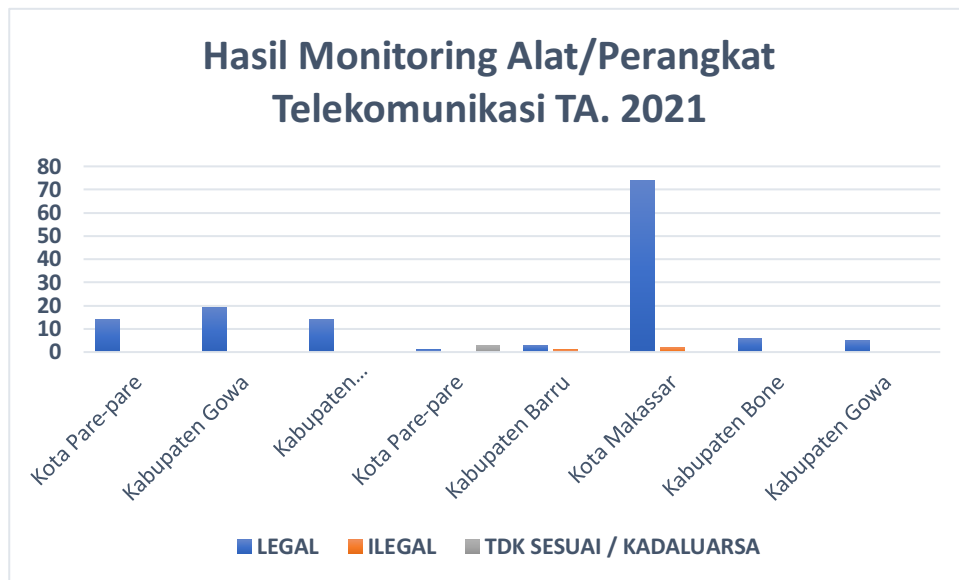
8. Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan	9 Kegiatan	300%

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Indikator Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

Selain mengawasi penggunaan frekuensi di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar juga melaksanakan pengawasan penggunaan perangkat telekomunikasi. Pengawasan penggunaan perangkat telekomunikasi ini sebagai upaya meminimalisir penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak terstandarisasi, dimana perangkat yang belum terstandarisasi beresiko memiliki parameter teknis yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menimbulkan gangguan frekuensi bagi pengguna frekuensi lainnya.

Balai Monitor SFR kelas I Makassar telah melaksanakan 9 kegiatan Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi di 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini mencapai 300%.



Gambar 3.13. Grafik Hasil Monitoring Sertifikat Alat/perangkat Telekomunikasi TA. 2021

Hasil Monitoring Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.13. Tingkat legalitas alat/perangkat telekomunikasi yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil monitoring sertifikasi alat/ perangkat Telekomunikasi sebesar 95,77%. Dimana temuan terhadap alat/perangkat Telekomunikasi yang ilegal dan Tidak Sesuai di Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kabupaten Barru telah ditertibkan.

9. Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
	KINERJA			CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi	1 Kegiatan	3Kegiatan	300%

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indikator Penertiban Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi

Hasil kegiatan Monitoring Sertifikat alat/perangkat telekomunikasi ditindaklanjuti dengan kegiatan penertiban Sertifikat alat/perangkat telekomunikasi. Target kinerja TA. 2021 untuk indikator ini adalah 1 (satu) kegiatan. Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan penertiban Sertifikat alat/perangkat telekomunikasi di Kota Pare-Pare, Kab. Barru dan kota Makassar. Diharapkan dengan dilakukan penertiban alat/perangkat telekomunikasi, maka tertib penggunaan spectrum frekuensi radio dapat terwujud.

No	Kabupaten	Nama Client	Perangkat			Jenis Pelanggaran		Tindakan (Teguran Tertulis/ Diamankan/ Disegel)
			Jenis	Merk	Type	Tidak Bersertifikat	Tidak Sesuai	
1	Kota Parepare	PT. BUNGA TERATAI (KM. PRINCE SOYA)	HT	Motorola	SP 1660 VHF		✓	Teguran tertulis/Surat Pernyataan
2	Kota Parepare	PT. PANCA MERAK SAMUDERA (KM. QUEEN SOYA)		Motorola	SP 1660 VHF		✓	Teguran tertulis/Surat Pernyataan
3	Kota Parepare	KM. TANJUNG MAIWA		Motorola	SP 1660 VHF		✓	Teguran tertulis/Surat Pernyataan
4	Kabupaten Barru	PT. RADIO IGA BARRU	Pemancar FM	Rakitan		✓		Perangkat Diamankan dan Disegel
5	Kota Makassar	PT. Media Net	Wireless Access Point	Ubiquiti	Power Beam M5-400		✓	Perangkat Disegel
6	Kota Makassar	PT. PLN (unit UP2D)	Wireless IP / Ethernet Connectivity	MDS	4710 HL Data Transceiver		✓	Teguran tertulis/Surat Pernyataan

Tabel 3.13. Hasil Penertiban Sertifikasi Alat/Perangkat Telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021

10. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
	KINERJA			CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik	80%	100 %	125%

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2021, indikator kinerja untuk pelaksanaan sosialisasi pelayanan public ditargetkan minimal 50% wilayah dan meliputi sosialisasi bidang dinas penyiaran, dinas bergerak darat, dan sosialisasi perangkat dan frekuensi legal sebanyak 2 (dua) kali laporan dengan target 80% terlaksana.

Dari target yang diberikan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada :

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan	Tema Kegiatan	Jumlah Peserta	Cakupan wilayah
1	08 April 2021	Makassar	Sosialisasi Pelayanan Izin Amatir Radio (IAR) dan Komunikasi Satelit Amatir	55	20 (83%)
2	30 November 2021	Makassar	Tertib Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	50	12 (50%)

Tabel 3.15 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Tahun 2021

Dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan public diatas telah mencakup lebihdari 80% wilayah layanandari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan pelaksanaan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan sehingga realisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar adalah sebanyak 100 % dengan capaian 125%.

11. Persentase (%) Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
	KINERJA			CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT	100 %	100 %	100%

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio merupakan ujian negara yang diperuntukkan bagi calon amatir radio dan atau amatir radio untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR) sesuai dengan tingkatannya. Adapun tingkatan dari amatir radio yang diujikan yaitu tingkat siaga, tingkat penggalang dan tingkat penegak. Pelaksanaan ujian dilaksanakan secara CAT (*Computer Assisted Test*) dimana setiap peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dapat secara langsung mengetahui nilai yang didapatkan secara langsung, dimana peserta dengan nilai diatas ambang batas 50 dinyatakan lulus.

Di tahun 2021 target pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT (*Computer Assisted Test*) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar adalah sebesar 100% yang diukur dari pelaksanaan ujian sebanyak minimal 5 kali dan atau 100 peserta yang mengikuti ujian. Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT sendiri dilaksanakan dalam dua jenis ujian reguler dan non-reguler, dimana untuk ujian regular merupakan ujian yang rutin dilaksanakan di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sedangkan untuk ujian non-reguler merupakan ujian yang dilaksanakan pada lokasi kota/kabupaten diluar ujian regular.

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan Ujian	Tipe UNAR	Jumlah Peserta	Hasil Ujian		Persentase Kelulusan
					Lulus	Tidak Lulus	
1	18 Feb 2021	Gedung Aula Balmon Makassar	Reguler	92	84	8	91%
2	22 Feb 2021	Gedung Aula Balmon Makassar	Reguler	31	29	2	94%
3	22 Mar 2021	Gedung Aula Balmon Makassar	Reguler	55	46	9	84%
4	24 May 2021	Kabupaten Gowa	Reguler	71	67	4	94%
5	12 Jun 2021	SMK Negeri 2 Rantepao, Kab. Toraja Utara	Non Reguler	103	94	9	91%
6	28 Jun 2021	SMP Negeri 4 Sungguminasa, Gowa	Reguler	65	62	3	95%
7	30 Aug 2021	Gedung Aula Balmon Makassar	Reguler	48	43	5	90%
8	27 Sep 2021	Gedung Aula Balmon Makassar	Reguler	65	53	11	82%
9	25 Oct 2021	Gedung Aula Balmon Makassar	Reguler	101	91	10	90%
10	3 Dec 2021	Gedung Aula Balmon Makassar	Reguler	51	44	7	86%
11	20 Dec 2021	Gedung Aula Balmon Makassar	Reguler	44	39	5	89%
Total				726	652	73	90%
Jumlah Reguler				10			
Jumlah Non Reguler				1			

Tabel 3.17. Hasil Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT Selama Tahun 2021

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar di tahun 2021 adalah sebanyak 11 kali kegiatan yang terdiri dari 10 kali ujian Reguler dan 1 kali Ujian Non-Reguler dengan jumlah peserta sebanyak 726 peserta. Dimana capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

12. Persentase (%) Pelaksanaan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi

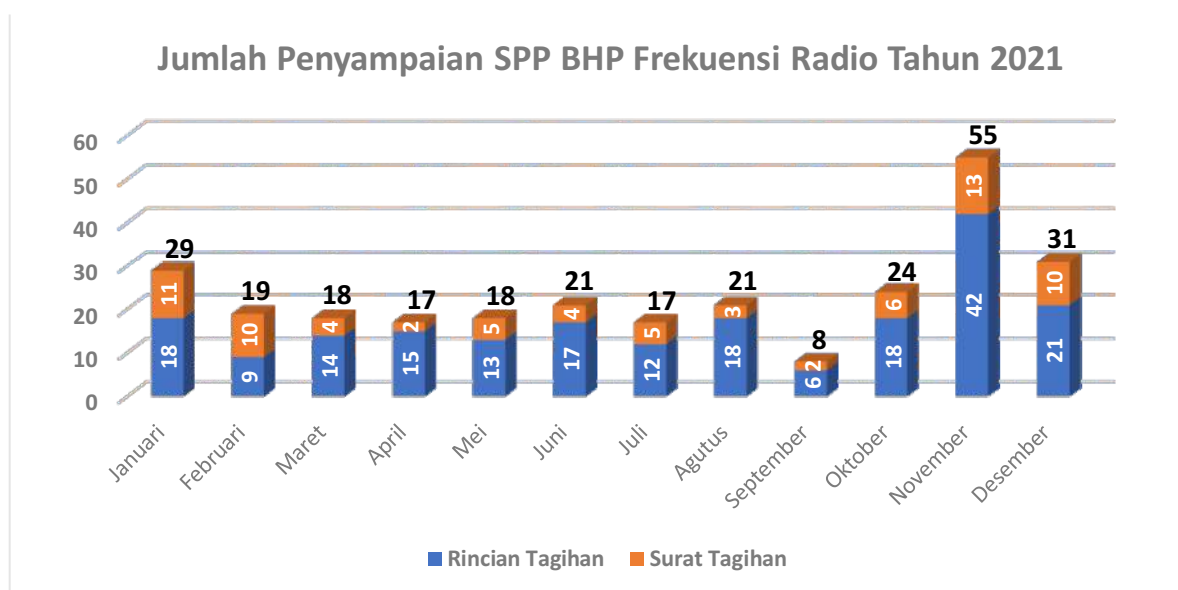
Radio

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan dan Penanganan Piutang BHP	100 %	100 %	100%

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan dan Penanganan Piutang BHP

Kegiatan pelaksanaan dan penanganan piutang BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi radio dilaksanakan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penggunaan spectrum frekuensi radio. Kegiatannya meliputi klarifikasi penanganan piutang BHP frekuensi radio dan pendampingan penanganan piutang BHP frekuensi radio yang dilimpahkan ke Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada tahun 2021 indikator kinerja untuk pelaksanaan dan penanganan piutang BHP frekuensi radio adalah sebesar 100% untuk penyampaian SPP BHP frekuensi radio dan 4 laporan koordinasi pelimpahan piutang, dimana capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar di tahun 2021 adalah sebesar 100% persen.



Gambar 3.14 Jumlah Penyampaian SPP BHP Frekuensi Radio

Jumlah penyampaian SPP BHP frekuensi radio yang disampaikan kepada wajib bayar selama tahun 2021 adalah sebanyak 278 SPP BHP frekuensi radio yang terdiri atas 203 Rincian Tagihan dan 75 Surat Tagihan. Adapun untuk jumlah SPP BHP frekuensi radio terbanyak adalah di bulan November dan Desember sebanyak 55 dan 31 SPP BHP frekuensi radio.

No	Wajib Bayar	Kantor KPKNL	Tahun Pelimpahan	Nilai Penyerahan	Tahap Pengurusan	Keterangan
1	Koperasi Taksi Bandar Udara Hasanuddin	KPKNL Makassar	2017	Rp. 7.131.497	Lunas (SPPNL)	SPPNL-04/PUPNC.23.01/2021
2	Tritunggal Jaya Agung Lestari, PT.	KPKNL Makassar	2018	Rp. 2.926.057	BA Surat Paksa	Lap-03/WKN.15/KNL.0204/2021
3	KSU Batara Mandiri	KPKNL Palopo	2017	Rp. 22.228.904	Lunas (SPPNL)	Nomor : SPPNL-10/PUPNC.23.03/2021

4	PT. Radio Gema Nuansa Remaja	KPKNL Parepare	2020	Rp. 781.615	Lunas (SPPNL)	SPPNL-19/PUPNC.23.02/2021
5	Arjuna Furniture, CV.	KPKNL Makassar	2019	Rp. 4.152.077	BA Surat Paksa	Lap-02/WKN.15/KNL.0204/2021
6	PT. Citra MandiriPersada Pratama	KPKNL Makassar	2019	Rp. 1.401.287	BA Surat Paksa	Lap-04/WKN.15/KNL.0204/2021
7	PT. Pelita Mahkota Hotel Indo	KPKNL Makassar	2020	Rp. 902.761	BA Surat Paksa	Lap-07/WKN.15/KNL.0204/2021
8	PT. Yuhana Four Dalle/Harun HR	KPKNL Makassar	2020	Rp. 1.583.636	BA Surat Paksa	Lap-06/WKN.15/KNL.0204/2021

Tabel 3.19 Daftar Pelimpahan Piutang KPKNL Tahun 2021

Dari hasil kegiatan koordinasi dan pendampingan penanganan piutang yang dilimpahkan ke KPKNL pada tahun 2021 ada 8 (delapan) wajib bayar yang telah dilakukan upaya pengurusan pada masing-masing KPKNL Makassar, KPKNL Parepare, dan KPKNL Palopo dengan jumlah pelimpahan nihil dikarenakan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara bahwa untuk piutang dibawah 8 (delapan) juta rupiah tidak dapat dilimpahkan pada PUPN sehingga diselesaikan sendiri oleh Kementerian Negara/Lembaga. Sehingga jumlah keseluruhan ada 3 (tiga) wajib bayar yang telah menyelesaikan piutang dan 5 (lima) wajib bayar yang ditingkatkan ketahap Berita Acara Surat Paksa.

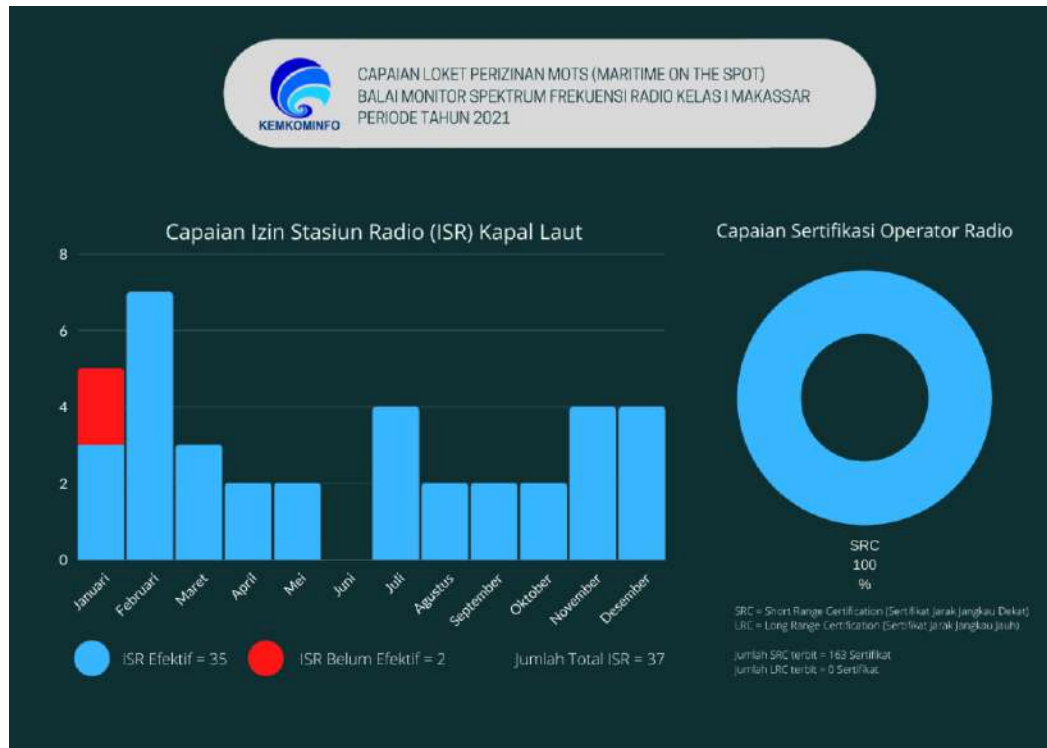
13. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan	90 %	141,05 %	156,72%

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan

Pelaksanaan Sosialisasi dan atau SRC/LRC dan Jumlah ISR Maritim Nelayan dilaksanakan dalam program *Maritime On The Spot* (MOTS) selama tahun 2021. MOTS merupakan salah satu program rencana strategis (RENSTRA) 2020-2024 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung ke nelayan agar terciptanya penggunaan frekuensi radio khususnya dinas maritim yang sesuai dengan peruntukan, meningkatkan kesadaran keselamatan pelayaran, dan mengurangi gangguan frekuensi penerbangan yang disebabkan oleh penggunaan frekuensi yang tidak sesuai. Adapun indikator kinerja yaitu pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis sertifikasi kecakapan operator radio non *Global Maritime Distress Safety System* (GMDSS) jarak jangkauan dekat (*Short Range Certification*) atau jarak jangkauan

jauh (*Long Range Certification*) sebanyak 2 (dua) kegiatan serta pelayanan loket MOTS dengan target 10 (sepuluh) izin untuk pelayanan ISR maritim.



Gambar 3.15 Capaian Izin Stasiun Radio (ISR) Tahun 2021

Dari hasil capaian jumlah Izin Stasiun Radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selama tahun 2021 pada loket pelayanan di Pelabuhan Paotere Makassar adalah sebanyak 37 (tigapuluhtujuh) Izin Stasiun Radio (ISR) maritim yang terbit dan 163 (serratus enampuluhtiga) sertifikat SRC yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan bimbingan teknis di :

1. Kantor KSOP Kelas III Parepare dengan peserta sebanyak 95 orang
2. Pelabuhan Beba, Takalar dengan peserta sebanyak 68 orang

Dengan demikian target dari hasil pelaksanaan MOTS selama 2021 dapat terealisasi sebesar 141,05 % dengan capaian 156,72 %. Capaian ini juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan penertiban pengguna maritim serta kerjasama dengan instansi terkait.

14. Persentase (%) Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data

ISR

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR	90 %	92,78 %	103,08%

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Terkait Validasi Data ISR

Kegiatan Inspeksi stasiun Radio merupakan tindaklanjut dari kegiatan Validasi data ISR yang bertujuan meningkatkan kualitas akurasi dan validitas data ISR untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan dan pengelolaan data yang dapat memberi nilai tambah untuk kepentingan publik. Target dari kegiatan ini adalah 90% ISR hasil inspeksi Valid dari data sampling.

Data yang tidak sesuai ISR ditindaklanjuti agar sesuai ISR dengan cara:

- Penerbitan ISR Baru
- Perubahan data ISR
- Penghentian Masa Laku ISR

Pelaksanaan kegiatan Inspeksi Stasiun Radio Balai Monitor SFR Kelas I Makassar pada Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada Operator Seluler. Lambatnya respon dari pengguna frekuensi dalam hal ini Operator Seluler, menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Namun setelah kegiatan Penertiban Nasional dilaksanakan

dimana telah diberlakukannya Kepdirjen SDPPINo. 107 Tahun 2021 mengenai sanksi administratif bagi pengguna frekuensi yang tidak sesuai ISR dan Ilegal maka nilai tindaklanjut hasil inspeksi yang Tidak Sesuai ISR semakin meningkat. Balai Monitor SFR Kelas I Makassar juga melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Hasil Inspeksi dengan Operator Seluler untuk mengetahui tindaklanjut yang telah dilakukan oleh Operator Seluler terhadap hasil kegiatan inspeksi ini. Oleh karenanya pada akhir bulan Desem bertahun 2021 diperoleh capaian nilai 92,78 % data ISR Valid.

Data ISR Pada SIMS	Data Sampling	Hasil Inspeksi			TindakLanjut Hasil Inspeksi Yang Tidak Sesuai ISR			Capaian (% Valid)
		Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio TidakAktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	
		Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
20475	2855	2331	246	156	122	318	206	92,78

Tabel. 3.22. Resume Hasil Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Tahun 2021

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) *Score* merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA yang saat ini telah terintegrasi pada Aplikasi OM-SPAN

dan digunakan oleh satker K/L diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dari sisi teknis administrative pelaksanaan anggaran.

Kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja pada tahun 2021 kembali mengalami tantangan yang cukup berat, hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai menyebabkan seluruh aktifitas masyarakat menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan beberapa program kerja harus dijadwalkan kembali.

KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
	KINERJA			CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran SDPPI	86	96,38	112,06%

Tabel 3.23. Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran SDPPI

Indikator Kinerja	2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran SDPPI	-	-	-	-	94	95,17

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran SDPPI	86	95,27	86	96,38

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran SDPPI 5 Tahun Terakhir

Tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mencapai nilai IKPA akhir sebesar 96,38% atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86%. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah melaksanakan pengelolaan anggaran pada tahun 2021 dengan cukup baik, baik dari sisi perencanaan anggaran mau pun efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

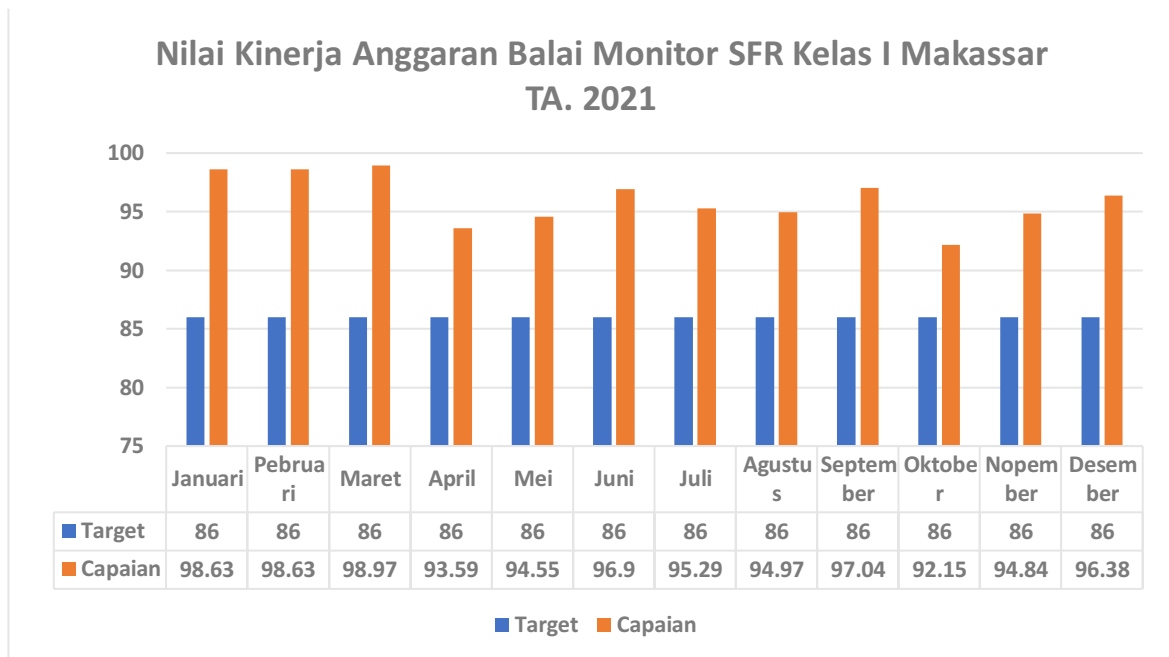
Capaian *output* bagi satuan kerja K/L mempunyai nilai sangat penting karena sebagai alat ukur seberapa jauh anggaran yang disediakan dapat menghasilkan output seperti yang telah direncanakan/ditargetkan pada awal tahun anggaran. Yang terpenting lagi bahwa capaian output K/L dimaksudkan untuk menghasilkan *outcome* yang manfaatnya ditujukan untuk masyarakat luas. Dibawah ini merupakan indikator-indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan:

Penyesuaian Bobot 13 Indikator				
$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$				
No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
1.	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%
2.	Data Kontrak	15%	15%	10%
3.	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%
4.	Capaian Output	-	10%	17%
5.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%
6.	Revisi DIPA	5%	5%	5%
7.	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%
8.	LPI Bendahara	5%	5%	5%
9.	Renkas	5%	5%	5%
10.	Kesalahan SPM	6%	5%	5%
11.	Retur SP2D	6%	5%	5%
12.	Pagu Minus	4%	5%	5%
13.	Dispensasi	4%	5%	5%
TOTAL		100%	100%	100%

Gambar 3.16: Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Sumber : www.djpb.kemenkeu.go.id

Berikut perbandingan capaian IKPA Score yang dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selama tahun anggaran 2021 dengan target Nilai IKPA yang telah ditetapkan oleh SDPPI :



Gambar 3.17. Capaian Nilai IKPA Tahun Anggaran 2021

B. Kinerja Lainnya

Pada tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memperoleh penghargaan dari mitra kerja KPPN Makassar I sebagai satker dengan nilai IKPA tertinggi keempat untuk penilaian semester I tahun anggaran 2021 kategori pagu kecil di 30 miliar dengan nilai IKPA sebesar 96.9 pada Semester I Tahun Anggaran 2021.



Gambar 3.18 Piagam Penghargaan IKPA Semester I TA 2021

C. Keuangan dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai rencana yang disusun walaupun ada beberapa kegiatan yang harus dijadwalkan kembali pelaksanaannya yang disebabkan pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kabupaten/kota menerapkan pembatasan keluar-masuk perbatasan. Selama tahun 2021, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melakukan 9 (sembilan) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi kewenangan KPA dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada Bulan Februari, Bulan November sebanyak 2 (dua) kali dan pada Bulan Desember 2021.
2. Revisi kewenangan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Bulan April dan Bulan Desember 2021.

3. Revisi kewenangan DJA dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Bulan Mei, Bulan Juni dan Bulan Oktober 2021.

Total pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebesar Rp. 19.254.226.000,- yang bersumber dari RM sebesar Rp. 7.346.331.000,- dan PNPB sebesar Rp. 11.907.895.000,- yang tertian dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-059.03.2.613434/2021 tanggal 23 November 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Output	Uraian	Pagu	Target Kegiatan
1.	4499.BAH.010	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumberdaya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Makassar	Rp. 1.867.763.000,-	76 Layanan
2.	4499.BAH.047	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Makassar	Rp. 302.575.000	13 Layanan
3.	4499.BAH.078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio UPT Ditjen SDPPI	Rp. 3.947.386.000	1 Layanan
4.	4489.EAA.103	Gaji dan Tunjangan	Rp. 3.958.773.000	1 Layanan
5.	4489.EAA.104	Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPT	Rp. 4.361.811.000	1 Layanan
6.	4489.EAC.102	Layanan Internal Overhead UPT	Rp. 4.815.918.000	1 Layanan
TOTAL PAGU			Rp. 19.254.226.000,-	

Tabel 3.25 Pagu Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2021

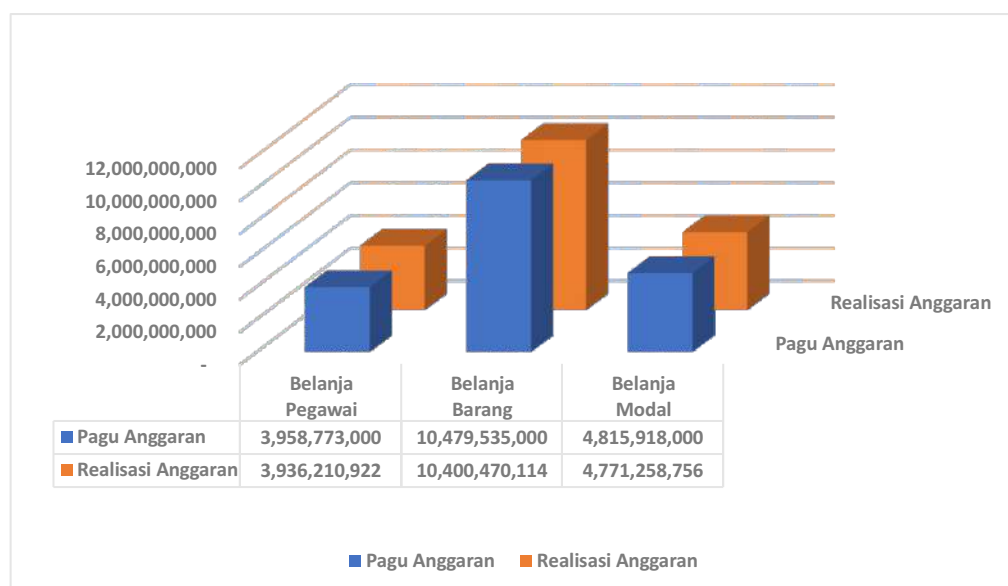


Gambar 3.19 Komposisi Pagu Anggaran Per Komponen Tahun 2021

Realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 19.107.939.792,- atau sebesar 99,24% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 19.254.226.000,-.

Uraian	2021		Persentase (%)
	Pagu	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp. 3.958.773.000	Rp. 3.936.210.922	99.43%
Belanja Barang	Rp. 10.479.535.000	Rp. 10.400.470.114	99.25%
Belanja Modal	Rp. 4.815.918.000	Rp. 4.771.258.756	99.07%
Total	Rp. 19.254.226.000	Rp. 19.107.939.792	99.24%

Tabel 3.26. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021



Gambar 3.20. Grafik Jumlah Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	2017		2018		2019	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 4.539.525.695	99,31	Rp. 4.049.125.119	98,39	Rp. 4.166.721.926	97,80
Belanja Barang	Rp. 10.262.628.137	96,70	Rp. 9.648.960.691	97,79	Rp. 9.475.163.144	98,24
Belanja Modal	Rp. 1.046.223.687	95,37	Rp. 466.312.975	99,47	Rp. 129.202.963	98,25
TOTAL	Rp. 15.848.377.519	97,35	Rp. 14.164.398.785	98,01	Rp. 13.771.088.033	98,11

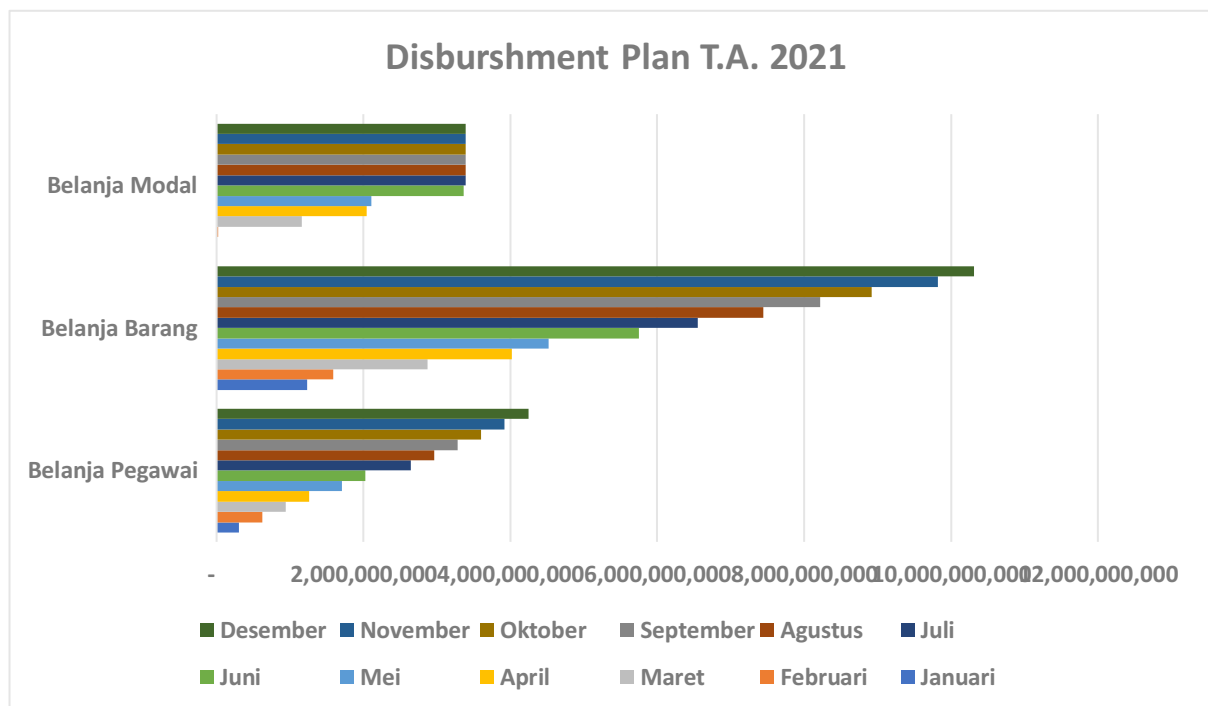
Uraian	2020		2021	
	Realisasi	%	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 4.640.001.955	98,97	Rp. 3.936.210.922	99,43
Belanja Barang	Rp. 9.340.533.601	99,96	Rp. 10.400.470.114	99,25
Belanja Modal	Rp. 1.697.915.500	99,95	Rp. 4.771.258.756	99,25
TOTAL	Rp. 15.678.451.056	99,66	Rp. 19.107.939.792	99,24

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017-2021



Gambar 3.21. Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

Agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada tahun 2021 lebih fokus, efektif dan efisien, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar membuat rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021. Rencana penyerapan anggaran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 3.22. Grafik Disbursement Plan Tahun 2021

ASET

Jumlah asset Balai Monitor SFR Kelas I Makassar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 38.682.361.580 yang terdiri dari asset lancar sebesar Rp. 3.292.395, asset tetap sebesar Rp. 38.425.007.535, dan asset lainnya sebesar Rp. 254.061.650, sesuai yang tertuang dalam neraca per 31 Desember 2021 dibawah ini :

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2021 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan: LSA/KB Tanggal : 31/01/22 Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
UNIT ORGANISASI : 03	DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	
WILAYAH/PROVINSI : 1900	SULAWESI SELATAN	
SATUAN KERJA : 613434	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR	
JENIS KEWENANGAN : KD	KANTOR DAERAH	

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	164,695
Persediaan	3,127,700
JUMLAH ASET LANCAR	3,292,395
ASET TETAP	
Tanah	21,788,333,000
Peralatan dan Mesin	33,783,143,961
Gedung dan Bangunan	8,653,868,123
Jalan, Irigasi dan Jaringan	879,006,610
Aset Tetap Lainnya	14,960,000
Akumulasi Penyusutan	(26,694,304,159)
JUMLAH ASET TETAP	38,425,007,535
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	2,049,992,370
Aset Lain-lain	17,799,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(1,813,729,720)
JUMLAH ASET LAINNYA	254,061,650
JUMLAH ASET	38,682,361,580
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	9,845,750
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9,845,750
JUMLAH KEWAJIBAN	9,845,750
EKUITAS	
Ekuitas	38,672,515,830
JUMLAH EKUITAS	38,672,515,830
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	38,682,361,580



Gowa, 31 Desember 2021
Kepala Kantor
Helmi Wartapane
NIP.196403231989031004

Gambar 3.23 Neraca Per 31 Desember 2021

D. Kepegawaian dan Umum

Tahun 2021 jumlah pegawai pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar adalah sebanyak 52 (limapuluhdua) orang dengan rincian sebagai berikut, ASN sebanyak 29 (duapuluh Sembilan) orang, PNP sebanayk 8 (delapan) orang, petugas keamanan sebanyak 8 (delapan) orang, petugas kebersihan sebanyak 5 (lima) orang dan sopir sebanyak 2 (dua) orang yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2021 :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	GRADE	KET
1	Ir. H. HELMI WARTAPANE, MM	PEMBINA TK. I	KEPALA BALAI	13	
	196403231989031004	IV.A			
2	MUH. SYAHID MASYHUDI, ST	PENATA	Plt. KASUBAG TU & RT	11	TU DAN RT
	197908112006041001	III.C			
3	NUR FAJRI RAHMAYANI A,SE,MM,.	PENATA TK. I	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 3	9	
	198503242009012006	III.D			
4	SITTI ASNAWATI, SH, MH,.	PENATA	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 3	9	
	197304122003122004	III.C			
5	MUHAMMAD SALDY, S,Sos	PENATA	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 3	9	
	197503122007011001	III.C			
6	HIKMAWATI, SE	PENATA	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 2	8	
	1984406142008122002	III.C			
7	ANDI SYAMSUL ALAM, SS	PENATA	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 2	8	
	197912162008121001	III.C			
8	FITRIANI SYAHRIR, A.Md	PENGATUR TK. I	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 2	8	
	198606062008032002	III.D			
9	ARIFIN	PENGATUR TK. I	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 2	8	
	106802132007011001	III.D			
10	ANDI FATARAI	PENGATUR TK. I	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 2	8	
	198212142007011001	III.D			
11	A. NIRWANA	PENGATUR	ANALIS SUMBER DAYA MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 2	8	
	197708072007012003	III.C			
12	SUDIRMAN	PENGATUR	ANALIS SUMBER DAYA	8	

	197305172009121001	III.C	MONITORING FREKUENSI RADIO LEVEL 2		
13	YUDI PURNOMO, SH, MH,.	PEMBINA	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN	11	SEKSI PANTIB
	196506271985031003	IV.A			
14	H. ASRIADI, ST	PEMBINA	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI AHLI MADYA	11	
	196410281986031003	IV.A			
15	DEWI ARISYANTI, ST,MT,.	PENATA TK. I	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI MUDA	9	
	198004072006042004	III.D			
16	SUSI PRIHANINGSIH	PENATA TK.I	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI MUDA	9	
	196705271989032001	III.D			
17	MUH. IDRIS KADIR, ST,MH,.	PENATA TK.I	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI MUDA	9	
	197806232006041002	III.C			
18	NURLAILA UMAR, ST	PENATA	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI MUDA	9	
	198007292008032001	III.C			
19	ABDUL MADJID HASANUDDIN, ST	PENATA	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI MUDA	9	
	198304112008031003	III.C			
20	AHRIANI TANRIGAU, ST	PENATA MUDA TK. I	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI PERTAMA	8	
	198011232008032002	III.B			
21	NURLAELA USMAN, ST	PENATA MUDA TK. I	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI PERTAMA	8	
	198311122008022003	III.B			
22	ASEP RAHAYU SAPUTRA, ST	PENATA MUDA	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI PERTAMA	8	
	198012102005021001	III.A			
23	DEDY MULYADI, ST, M.Adm.SDA	PENATA TK.I	PENGELOLA DATA PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN	9	
	197306112005021001	III.D			
24	NUR ASYWIN SYAH, ST	PENATA TK.I	PENGEVALUASI BIDANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	9	SEKSI SARPEL
	198002092009011008	III.D			
25	ISHAK KASMIR, SE	PENATA	PENGELOLA DATA OPERASI DAN PERBAIKAN	9	
	197504232008041006	III.C			

26	HUDAYA LIRA, SE,MH,.	PENATA	PENGELOLA DATA OPERASI DAN PERBAIKAN	9	
	197703252005021001	III.C			
27	IRWAN ASIS REKENG	PENGATUR MUDA TK. I	PENGEVALUASI BIDANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	9	
	198004122006041004	II.B			
28	IKRA ZULFIKAR, A.Md	PENGATUR	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO	CPNS	
	199508282019031004	II.C			
29	FACHRUR ROZI, A.Md	PENGATUR	FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO	CPNS	
	199605292019021002	II.C			

Tabel 3.28 Daftar ASN Tahun 2021

Daftar PPNPN Tahun 2021:

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DewiSartika	Perempuan
2.	TakdirAlisyahbana	Laki-Laki
3.	Salman Alfarizi	Laki-Laki
4.	Hadriansyah Reza	Laki-Laki
5.	Hasriadi	Laki-Laki
6.	AlfizarSuhendra	Laki-Laki
7.	Andi Tapa Mustapa	Laki-Laki
8.	HermawatiSuparya	Perempuan

Tabel 3.29 Daftar PPNPN Tahun 2021

Daftar Petugas Keamanan Tahun 2021:

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jumardi	Laki-Laki
2.	Nur Salim	Laki-Laki
3.	Syamsuddin	Laki-Laki
4.	Hasanuddin	Laki-Laki
5.	Supriadi	Laki-Laki
6.	Asjayadi	Laki-Laki
7.	Armin	Laki-Laki
8.	Subair	Laki-Laki

Tabel 3.30 Petugas Keamanan Tahun 2021

Daftar Petugas Kebersihan Tahun 2021:

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Hajir Dg. Rapi	Laki-Laki
2.	Yulianti	Perempuan
3.	Suhaemi	Laki-Laki
4.	Syhabullah	Laki-Laki
5.	Sulaiman	Laki-Laki

Tabel 3.31 Daftar Petugas Kebersihan Tahun 2021

Daftar Sopir Tahun 2021:

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Muhaimin Yahya	Laki-Laki
2.	Abd. Asis	Laki-Laki

Tabel 3.32 Daftar Sopir Tahun 2021

Kenaikan pangkat merupakan salah satu hak ASN yang harus diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan dibidang kepegawaian. Pada tahun 2021, sebanyak 5 (lima) orang ASN pada Balai Monitor SFR Kelas I Makassar memperoleh kenaikan pangkat baik regular mau pun fungsional, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat Lama	Pangkat Baru	TMT
1.	Nur Fajri Rahmayani Agussalim NIP. 198503242009012006	III C	III D	01 April 2021
2.	Nur Asywin Syah NIP. 198002092009011006	III C	III D	01 April 2021
3.	Nurlaila Umar NIP. 198007292008032001	III C	III D	01 April 2021
4.	Sitti Asnawati NIP. 197304122003122004	III C	III D	01 Oktober 2021
5.	Ahriani Tanrigau NIP. 198011232008032002	III B	III C	01 Oktober 2021

Tabel 3.33 Daftar Kenaikan Pangkat Tahun 2021

Pada tahun 2021, Balai Monitor mencatat sebanyak 710 surat masuk dan 846 surat keluar, yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

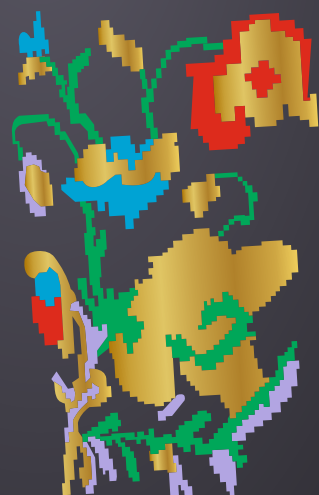
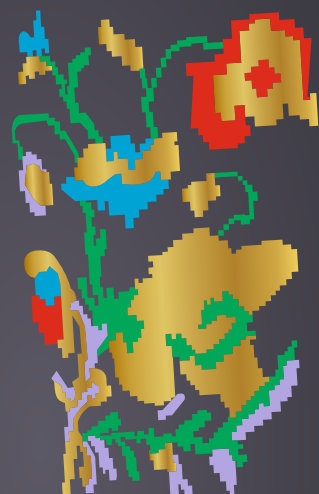
Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar
Januari	48	75
Februari	50	92
Maret	73	93
April	71	63
Mei	57	73
Juni	53	70
Juli	51	71
Agustus	42	39
September	85	63
Oktober	55	65
November	71	74
Desember	54	70

Tabel 3.34 Daftar Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2021



BAB IV

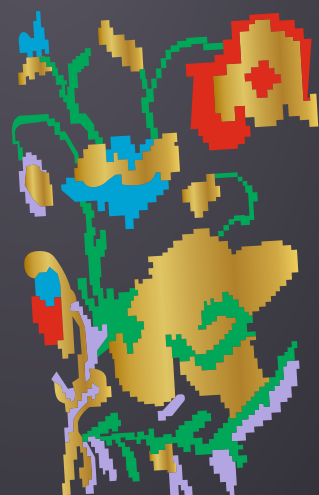
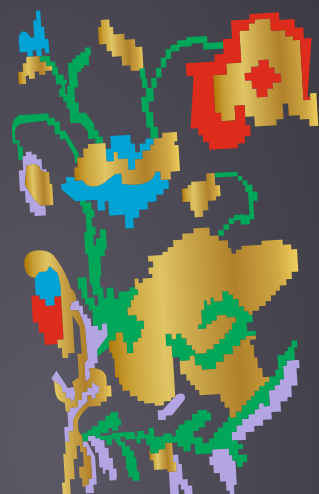






PENUTUP





KESIMPULAN

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spectrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu UPT Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar senantiasa bekerja dengan mengacu pada kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung misi Ditjen SDPPI, yaitu mewujudkan tatanan spectrum frekuensi radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.

Tahun 2021, target kinerja yang telah ditetapkan oleh Rencana Strategis UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menjadi pedoman kerja dan prinsip dasar pelayanan prima kepada para pengguna spectrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan telekomunikasi khususnya telekomunikasi yang menggunakan spectrum frekuensi radio (nirkabel) yang merupakan sumber daya terbatas milik negara yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menyadari banyaknya tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spectrum frekuensi radio dan

sertifikasi perangkat informatika, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar di masyarakat menuntut peningkatan kemampuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar kepada para pengguna spectrum frekuensi radio di wilayah kerjanya.

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2021, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan utama dan 15 indikator kinerja yang menjadi penilaian dalam penetapan capaian sasaran kegiatan utama tersebut.

Capaian dari masing-masing indikator kinerja secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, yang dapat dilihat dari nilai capaian masing-masing indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian halnya dengan kinerja pada bagian keuangan yang menunjukkan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 19.107.939.792,- atau sebesar 99,24% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 19.254.226.000,-.

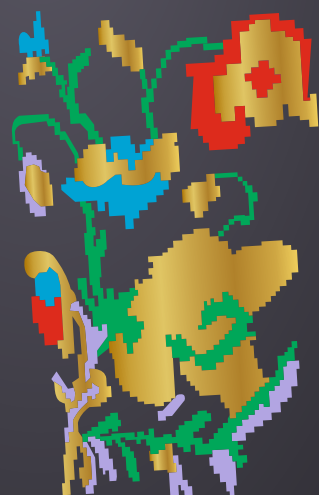
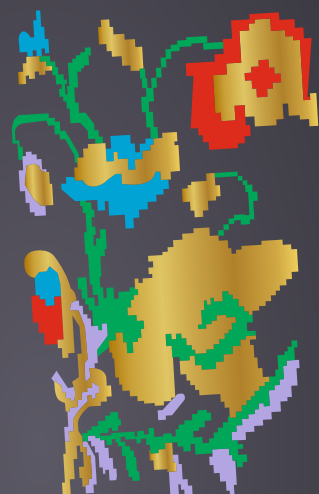
Laporan Kinerja (LAKIN) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Laporan Kinerja ini menggunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian telah diuraikan secara deskriptif sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan masukan terhadap Laporan Kinerja ini. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



PENUTUP

MAKASSAR







LAMPIRAN





PENERTIBAN



UNAR REGULER & NON REGULER



MARITIM ON THE SPOT (MOTS)



INSPEKSI STASIUN SLAVE DAN TRANSPORTABLE





SOSIALISASI FREKUENSI RADIO



GENERAL MEDICAL CHECK UP





VAKSINASI COVID 19





ANTIGEN





KEGIATAN TATA USAHA & RUMAH TANGGA





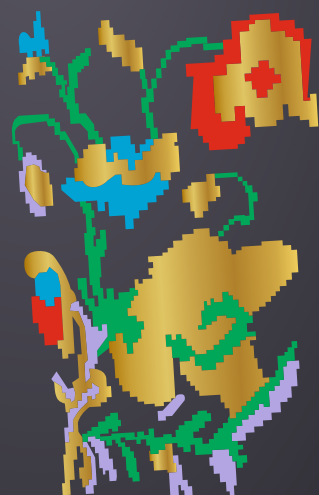
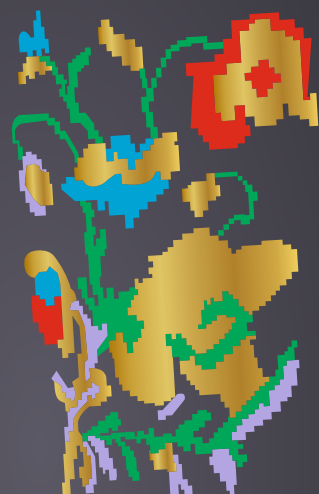
PENERIMAAN PENGHARGAAN IKPA SEMESTER I TA. 2021



TIM REDAKSI









Menuju Masyarakat Informasi Indonesia